PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

SKRIPSI

MELANI PUTRI

2216040021

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM

BONJOL PADANG

1448 H / 2026

PERNYATAAN KEORISINALAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa"** adalah benar hasil karya saya, sudah diuji tes plagiasi dan bukan merupakan tiruan atau dipublikasikan ataupun karya yang sudah dipublikasikan dan atau pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan UIN Imam Bonjol Padang ataupun di perguruan tinggi lainnya. Kecuali bagian yang sumber informasinya telah dicantumkan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tidak orisinil, maka saya bersedia untuk dibatalkan keabsahan skripsi ini dan gelar kesarjanaan saya.

Padang, 28 September 2026

Menyatakan



Melani Putri

2216040021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "**Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolan Alokasi Dana Desa** " yang disusun oleh Melani Putri NIM.2216040021 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan di setujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Agustus 2026

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Andriani Syofyan, ME.	**Misneli, SE., M.Si., Ak., CA., CPA**
NIP . 199103192018012002	**NIP . 198308262025212004**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **"Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Kantor Wali Nagari di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan)."** Disusun oleh Melani Putri, NIM 2216040021, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya alokasi dana desa yang di satu sisi mendorong pembangunan desa, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya fraud dalam pengelolaannya, salah satunya di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, yang diduga dipengaruhi oleh rendahnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, dan kelemahan pengendalian internal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa pada kantor Wali Nagari di Kecamatan IV Jurai. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 80 responden dari 20 nagari dengan teknik sampel jenuh, dan dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, sedangkan akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Ketiga variabel tersebut secara simultan mampu menjelaskan pencegahan fraud sebesar 84,5% ($R^2 = 0,845$).

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal, Pencegahan Frau, Dana Desa

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan tiada kalimat yang indah penulis tuturkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan untuk nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kehidupan yang berilmu yang sangat berarti bagi penulis untuk tidak mudah menyerah dan selalu ingat bahwa Allah akan memberikan keberhasilan disetiap kerja keras yang didasari niat karena-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa". Skripsi ini merupakan persyaratan guna menyelesaikan program sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisinis Islam UIN Imam Bonjol Padang.

Cinta pertama penulis bapak **Syafrial** sosok hebat yang menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan hingga sampai pada titik ini. Meski Ayah tidak menempuh pendidian yang tinggi dan bekerja sebagai seorang petani, dari setiap lelah dan perjuangan ayah, penulis belajar arti kerja keras, kesabaran, tanggung jawab, dan ketulusan. Terimakasih sudah tanpa banyak mengeluh, bekerja di bawah sinar matahari, dan selalu mengusahakan yang terbaik demi masa depan penulis. Sebagai anak perempuan bungsu ayah, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bukti kecil bahwa doa, tetes keringat, dan pengorbanan ayah tidak pernah sia-sia. Semoga pencapaian ini dapat menjadi alasan bagi ayah untuk tersenyum bangga.

Pintu surga penulis, Mama **Linda Musriati**, perempuan paling tulus yang doanya selalu tempat penulis pulang dalam keadaan apapun. Terimakasih sudah menghadirkan penulis kedunia dengan penuh perjuangan, merawat dengan kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta selalu menguatkan penulis lewat doa-doa yang mungkin tidak selalu terdengar tapi selalu penulis rasakan. Dalam setiap langkah penulis menyelesaikan skripsi ini, ada restu mama yang menjadi penenang, ada kasih sayang mama yang menjadi penguat, dan ada harapan mama yang membuat penulis terus bertahan. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk bukti penulis kepada mama, meskipun tidak pernah sebanding dengan cinta dan pengorbanan yang mama berikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. Rektor Universitas Imam Bonjol Padang.
2. Bapak. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Testru Hendra,M.Ag
3. Ibu Sandra Ayu, M.Si. Ketua Program Studi Akuntansi Syari'ah, Sekaligus Penasehat Akademik (PA)
4. Ibu Andriani Syofyan, ME Selaku pembimbing I dan Ibu Misneli, SE.,

M.Si., Ak., CA., CPA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staf UIN Imam Bonjol Padang

6. Kepada **Gilang Juanda, S.E** Terimakasih telah hadir di saat penulis membutuhkan seseorang untuk mendengarkan cerita, menemani kegelisahan, dan menguatkan Ketika semuanya merasa berat. Terimakasih untuk setiap perhatian kecil yang mungkin terliat sederhana, tetapi begitu berarti bagi penulis. Untuk setiap kalimat penyemangat, setiap doa, setiap kesabaran menghadapi mood penulis selama pengerjaan skripsi, dan setiap kali kamu meyakinkan penulis bahwa penulis mampu menyelesaikannya. Mungkin tidak semua dukunganmu dapat tertulis satu persatu dalam lembaran ini, tetapi semuanya tersimpan dalam memori dan akan selalu menjadi bagian dari perjalanan ini. Penulis menyadari menyelesaikan skripsi ini adalah tanggung jawab penulis. Namun penuis juga menyadari bahwa perjalanan menuju titik ini terasa lebih ringan karena penulis tidak menjalaninya sendirian. Ada kamu yang memberikan semangat dengan caramu sendiri

7. Kepada cinta kasih ketiga kakak penulis **Dosi Pardial** (abang), **Lisa Pedra ,S.H** (kakak), **Irma Suryani S.pd** (kakak). Terimakasih sudah menjadi bagian penting dalam hidup penulis, tempat berbagi cerita, serta sosok yang selalu penulis sayangi dan hormati. Kehadiran Abang dan kakak menjadi

salah satu penguat bagi penulis dalam menjalani setiap proses kehidupan. Kepada satu satunya adik penulis **Ahmad Fahmi**, terimakasih sudah menjadi sumber kebahagiaan dan semangat dalam setiap langkah penulis. Dik, hiduplah lebih baik dari kakakmu, teruslah berjuang dan jadilah pribadi yang selalu membawa kebanggan bagi keluarga.

8. Kepada keponakan-keponakan tercinta**, Arumi, Yumna, Adnan, Yugho, dan Arsy**, Terimakasih atas kelucuan-kelucuan kalian yang membuat penulis semangat dan selalu senang sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

9. Kepada Ibu **Nur Aini** Terimakasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Terimakasih atas doa, perhatian, dukungan, dan kasih sayang yang ibu berikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menerima penulis dengan begitu baik, memperlakukan penulis seperti anak sendiri dan selalu memberikan semangat di setiap langkah yang penulis jalani. Dengan penuh rasa syukur, Skripsi ini penulis persembahkan untuk ibu, yang insyallah kelak bukan hanya menjadi calon mertua tetapi juga menjadi orang tua kedua bagi penulis.

10. Teruntuk Sahabat penulis **Dini Tri Wahyuni Meliala**, Terimakasih telah menjadi sosok yang hadir dengan tulus dalam perjalanan hidup dan proses penyusunan skripsi ini. Untuk kamu yang sudah menemani perjalanan panjang ini dari maba, dari yang masih bingung dengan dunia perkuliahan, melewati tugas, drama kampus, cerita, tawa, tangis, sampai akhirnya penulis

lebih dulu sampai di titik ini. Mungkin hari ini penulis yang lebih dulu menyelesaikan skripsi, tapi penulis tahu perjuanganmu juga tidak mudah. Jangan pernah merasa tertinggal karna semua orang punya waktunya masing-masing. Semoga sebentar lagi giliran namamu yang berdiri disana mengenakan toga dan tersenyum bangga atas perjuangan yang sudah kamu lewati. Sampai saat itu tiba penulis orang pertama yang bangga atas pencapaianmu.

11. Kepada **Zikra Mahriza Nasution, S.Akun** terimakasih sudah jadi teman perjuangan dalam perjalanan panjang ini. Teman yang menemani dari urusan organisasi, berbagi cerita, saling menguatkan, sampai akhirnya sama-sama sibuk dengan dunia skripsi. Untuk semua waktu yang kita habiskan untuk bimbingan bersama, bolak-balik kampus, menunggu dosen, mencari tanda tangan, mengurus berkas, sampai pulang dengan membawa cerita tentang revisi yang tidak ada habisnya. Hal-hal ini mungkin terlihat sederhana, tetapi justru akan menjadi kenangan yang paling penulis rindukan nantinya.

12. Kepada **Alya** Terimakasih sudah menemani hari-hari penulis selama di kos, menjadi teman cerita, teman bercanda, dan tentunya menjadi orang yang selalu memberikan semangat di saat aku mulai lelah dengan segala urusan skripsi.

13. Terakhir, penulis sangat berterima kasih kepada wanita yang telah berjuang tanpa lelah, sosok perempuan yng memiliki impian yang sangat besar, yaitu

diri penulis sendiri, **Melani Putri, S.Akun.** Mungkin tidak banyak yang tahu bagaimana perjalanan ini sebanarnya. Di balik halaman skripsi yang akhirnya bisa di selesaikan, ada begitu banyak air mata, rasa sakit, lelah, takut,dan hari-hari dimana penulis hanya ingin menyerah. Ada hari-hari ketika tubuhku meminta untuk beristirahat, tetapi pikiranku memikirkan skripsi yang belum selesai. Terimakasih unuk diriku yang sudah berulang kali keluar masuk rumah sakit, terimakasih karena ditengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih, tapi penulis tetap memilih datang untuk bimbingan. Bukan karena penulis tidak lelah, tetapi karena penulis tahu ada sebuah impian yang harus penulis perjuangkan. Ada saat ketika penulis merasa tertinggal, merasa tidak sekuat orang lain, bahkan merasa mungkin penulis tidak akan mampu menyelesaikan semuanya. Namun ternyata penulis mampu. Dan jika suatu hari aku lupa betapa kuatnya diriku, semoga skripsi ini mengingatkanku bahwa bahwa pernah melewati masa yang begitu sulit dan berhasil sampai disini. Untuk diri penulis terimakasih sudah bertahan sejauh ini, kamu harus menjadi kuat setia hari. Setelah semua rasa sakit, air mata, dan perjuangan yang kamu lalui, akhirnya satu mimpimu berhasil kamu selesaikan.

Mudah-mudahan atas bantuan dan dukungan yang penulis terima mendapatkan balasan dan pahala berlipat ganda dari Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak ditemui kekurangan bahkan jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 27 2026
Penulis



MELANI PUTRI

NIM. 2216040021

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEORISINALAN ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
PERSEMBAHAN ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 9
E. Manfaat Penelitian 9
F. Sistematika Pembahasan 11
BAB II LANDASAN TEORI **12**
A. Kajian Teoritis 12
B. Kajian Terdahulu 38
C. Kerangka Berpikir 49
D. Hipotesis Penelitian 49
BAB III METODE PENELITIAN **53**
A. Jenis Penelitian 53
B. Lokasi Penelitian 53
C. Populasi dan Sampel Penelitian 54
D. Jenis dan Sumber Data 58
E. Teknik Pengumpulan Data 59
F. Variabel Penelitian 59
G. Teknik Analisis Data 63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **68**
A. Gambaran Umum Responden 68
B. Analisis Deskriptif 72
C. Analisis Data 76
D. Uji Hipotesis 90
E. Pembahasan 92
BAB V PENUTUP **105**

A. Kesimpulan 105
B. Keterbatasan Penelitian..... 106
C. Saran 108
DAFTAR PUSTAKA..... 110
LAMPIRAN 117

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kasus Korupsi Dana Desa 3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu..... 38
Tabel 3. 1 Populasi Penelitian 54
Tabel 3. 2 Sampel Nagari Penelitian 56
Tabel 3. 3 Rincian Responden per Nagari 57
Tabel 3. 4 Penetapan Skala Likert 59
Tabel 3. 5 Definisi Operasional Variabel..... 61
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Desa/Nagari 68
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin..... 70
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Pemerintah Nagari 70
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 71
Tabel 4. 5 Tingkat Pencapaian Responden 73
Tabel 4. 6 TCR Variabel Transparansi 73
Tabel 4. 7 TCR Variabel Akuntabilitas 74
Tabel 4. 8 TCR Variabel Pengendalian Internal..... 75
Tabel 4. 9 TCR Variabel Pencegahan Fraud..... 75
Tabel 4. 10 Outer Loading 77
Tabel 4. 11 Outer Loading 79
Tabel 4. 12 Nilai Composite Reliability Uji Coba 80
Tabel 4. 13 Hasil Uji Convergent Validity 83
Tabel 4. 14 Nilai Average Variance Extracted..... 85
Tabel 4. 15 Nilai Composite Reliability 86
Tabel 4. 16 Nilai Cronbach Alpha..... 87
Tabel 4. 17 Nilai R-Square..... 88
Tabel 4. 18 Nilai Q-Square 89
Tabel 4. 19 Hasil Uji Hipotesis 90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir 49
Gambar 4. 1 Structural Outer Model 82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional Indonesia pada era reformasi birokrasi menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya mendorong pembangunan yang merata hingga ke tingkat desa sebagai bagian dari strategi pemerataan ekonomi nasional dan penguatan otonomi daerah.[1] Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paradigma pembangunan desa mengalami transformasi fundamental dari pendekatan *top-down* menjadi *bottom-up* yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola sumber daya dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.[2]

Implementasi kebijakan tersebut ditandai dengan penyaluran alokasi dana desa kepada lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia secara berkelanjutan. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024), total dana desa yang disalurkan mencapai Rp71 triliun pada tahun 2024 dengan peningkatan signifikan dari Rp20,7 triliun pada tahun pertama pelaksanaan kebijakan tersebut. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, dan penguatan kapasitas kelembagaan

[1] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014).
[2] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (2014).

UIN IMAM BONJOL PADANG

pemerintahan desa. Peningkatan anggaran yang besar ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan desa sebagai basis ekonomi kerakyatan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia.[3] Peningkatan jumlah dana yang dialokasikan kepada desa membawa konsekuensi pada kompleksitas pengelolaan keuangan di tingkat desa. Realitas empiris menunjukkan bahwa dana desa yang begitu besar membuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan publik.[4]

Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2023), terdapat lebih dari 900 kasus penyimpangan dana desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp108 miliar yang terdeteksi dalam kurun waktu satu tahun pengawasan. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai modus operandi seperti mark up harga pengadaan barang dan jasa, fiktifisasi kegiatan pembangunan, manipulasi laporan pertanggungjawaban keuangan, dan pemotongan anggaran secara tidak sah oleh oknum aparatur desa.[5] Hingga saat ini, fenomena penyalahgunaan dana desa masih terus terjadi, yang salah satunya disebabkan oleh lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di tingkat desa. Hal ini tercermin dari sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa yang diberitakan secara luas, termasuk dalam

UIN IMAM BONJOL PADANG

[3] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (2023).
[4] Made Yudantara Dharma Putra dan Ni Ketut Rasmini, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa," E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 28, no. 1 (2019): h. 132-158.
[5] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Tahun 2023," (2023).

liputan *Kompas.id* maupun laporan Indonesia Corruption Watch (ICW).[6]

Menurut Indonesia *Corruption Watch* (ICW).[7] Berikut ini adalah kasus korupsi dana desa dari tahun 2023-2025.

Tabel 1.1

Kasus Korupsi Dana Desa

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian
1.	2023	187	Rp. 162.200.000.000
2.	2024	77	Rp. 80.900.000.000
3.	2025	535	Belum di publikasi

Dari tabel diatas terlihat bahwasanya dari tahun 2023 ke 2024 terjadi penurunan kasus korupsi dan jumlah kerugian dana desa, namun di tahun 2025 terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan, hal ini mengapa peneliti ingin menelti lebih lanjut mengenai kasus ini.[8]

Kemampuan aparatur desa yang masih rendah untuk hal keuangan akan berpotensi munculnya penyalahgunaan dana desa bagi pelaku pemerintahan desa. Dapat dilihat dari portal berita online padang tv menyatakan bahwa telah terjadi kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh wali nagari di nagari Nanggalo, kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dana desa yang dianggarkan setiap tahunnya untuk seluruh desa yang ada di Kecamatan

[6] Indonesia Corruption Watch (ICW), "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023," (Jakarta: ICW, 2024); Indonesia Corruption Watch (ICW), "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024," (Jakarta: ICW, 2025).
[7] Indonesia Corruption Watch, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023," (Jakarta: ICW, 2024)
[8] Indonesia Corruption Watch, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024," (Jakarta: ICW, 2025).

tersebut sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Di tahun 2021 diduga bahwa adanya penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh wali nagari mencapai nominal hingga Rp.123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah).[9]

Dimana sumber dana desa tersebut diperoleh dari dana desa pemerintah, anggaran dana desa pemerintah daerah dan PBH (pajak bagi hasil). Tindakan yang dilakukan oleh wali nagari menjadi bentuk tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa di daerah itu. Kasus terkait penyelewengan keuangan desa ini menyebabkan kegelisahan bagi masyarakat serta pemerintah, apabila diselidiki secara mendalam pemerintah sesungguhnya telah menetapkan bermacam aturan serta pedoman tentang keuangandesa denga harapan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan mudah sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kecurigaan bahkan mendatangkan potensi kecurangan.[10]

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa, salah satunya adalah rendahnya transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah nagari dalam menyampaikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

[9] https://www.facebook.com/officialpadangtv/videos/wali-nagarinanggalodiberhentikan/1648133202250193/
[10] Anggrima Wati & Yuniasih. "Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Etis Manajemen Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Pengelolaan Dana Desa." HITA Akutansi dan Keuangan, 2021, hal 118-119.

dipercayakan kepadanya.[11] Ketika pemerintah nagari menerapkan keterbukaan informasi secara konsisten, masyarakat dapat memantau setiap penggunaan anggaran sehingga peluang penyimpangan menjadi lebih kecil. Rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu penyebab utama terbukanya celah bagi praktik kecurangan yang sulit terdeteksi oleh publik.

Faktor kedua yang memengaruhi terjadinya potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa adalah lemahnya akuntabilitas pada setiap aparatur desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap aparatur nagari untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada pihak yang berhak atau berwenang menerima pertanggungjawaban tersebut.[12] Tanpa adanya akuntabilitas yang memadai dalam pengelolaan dana desa, potensi penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa selaku pengelola dana menjadi lebih besar. Hal ini dikarenakan tidak terdapat mekanisme pertanggungjawaban yang mengikat setiap keputusan terkait penggunaan anggaran kepada masyarakat maupun instansi pengawas.[13]

Faktor ketiga yang turut memengaruhi potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa adalah kelemahan pada sistem pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

[11] Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), h. 30-35.
[12] LAN & BPKP, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP). Modul 3 dari 5, (Jakarta: LAN), 2000
[13] LAN & BPKP, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP), Modul 3 dari 5 (Jakarta: LAN, 2000); Arifiyanto, Fatchan Achyani dan Taufik Kurrohman, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember," Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2(3) (2014), hal. 473-485.

UIN IMAM BONJOL PADANG

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.[14] Pengendalian internal di tingkat pemerintahan desa berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan berjalan sesuai regulasi yang berlaku sehingga target pembangunan desa dapat terwujud. Pengendalian internal yang tidak berjalan secara memadai membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, sementara penerapan yang baik akan mempersempit ruang bagi praktik penyalahgunaan dana desa.[15]

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya, ketiga asas yang disebutkan dalam keputusan Permendagri tersebut harus dipegang pada setiap institusi dengan memperhatikan nilai moral dan nilai kemanusiaan yang menjiwai setiap langkah pemerintah.[16]

Riset tentang pencegahan *fraud* ini sudah banyak dilakukan diantaranya berbicara tentang faktor-faktor yang menjadi alasan dalam pencegahan *fraud*, hal

[14] Dwi Fitri Puspa, Riky Agung Prasetyo, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol. 20 No. 2 September 2020, hal 281-298

[15] Nada, I. Q. N., Kirana, N. W. I., "Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi Perangkat Desa, dan Employee Productivity Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi", Jurnal Literasi Akuntansi, Vol. 5 No. 4, Desember 2025, hal. 159-174.

[16] Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1). Sekretariat Negara. Jakarta.

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan tentang pencegahan *fraud* mengaruhi nilai perusahaan.[17] dan juga penelitian dari Biduri, Fitriyah, dan Febriana[18] dalam penelitiannya di Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa penyajian laporan keuangan desa, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa, dimana ketiga variabel tersebut masing-masing terbukti mendorong upaya pencegahan kecurangan.

Penelitian Islamiyah, Made, dan Sari[19] yang meneliti pemerintah desa di Kecamatan Wajak juga menegaskan bahwa kompetensi aparatur desa, moralitas individu, dan whistleblowing sangat berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya, Determinan Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.[20] Mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur, moralitas, integritas, dan budaya organisasi terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam alokasi dana desa. Berbagai temuan empiris tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, moralitas, whistleblowing, dan penguatan sistem merupakan pilar-pilar utama dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang bebas dari praktik

UIN IMAM BONJOL PADANG

[17] Elviani, D., Ali, S., & Kurniawan, R., "Pengaruh Kecurangan Laporan Keuangan terhadap Nilai Perusahaan: Ditinjau dari Perspektif Fraud Pentagon," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 20, No. 1, (Jambi: Universitas Batanghari Jambi), 2020, hal. 121–125

[18] Biduri, S., Fitriyah, H., dan Febriana, P., "Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 4, (Medan: Politeknik Ganesha, 2022), hal. 4021–4036.

[19] Islamiyah, F., Made, A., dan Sari, A. R., "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak," Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Vol. 8, No. 1, (Malang: Universitas PGRI Kanjuruhan, 2020), hal. 1–13.

[20] Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 12, No. 3, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), doi: 10.22219/jrak.v12i3.22363.

kecurangan.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada variabel penyajian laporan keuangan desa, kompetensi aparatur, moralitas individu, dan *whistleblowing*.

Namun penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal secara bersama-sama terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa secara bersamaan masih sangat terbatas dan belum banyak ditemukan, khususnya pada konteks nagari di Sumatera Barat. Kesenjangan penelitian (research gap) inilah yang membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Transparansi, Akuntanbilitas, dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa"**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian terfokus dan tidak meluas dalam meneliti, maka peneliti membatasi beberapa hal dalam penelitian ini, yaitu dilakukan di kantor wali nagari yang terdapat di kecamatan IV jurai, dan peneliti menggunakan variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal sedangkan variabel dependennya yaitu Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

UIN IMAM BONJOL PADANG

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan ,maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa di nagari Kecamatan IV Jurai?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa di nagari Kecamatan IV Jurai?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa di nagari Kecamatan IV Jurai?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di nagari Kecamatan IV Jurai?
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di nagari Kecamatan IV Jurai?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di nagari Kecamatan IV Jurai?

UIN IMAM BONJOL PADANG

E. Manfaat Penelitian.

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun orang lain. Begitu juga dengan penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai hal diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mempelajari lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu juga dapat menambah llmu pengetahuai mengenai pencegahan *fraud* dalam pengalokasian dana desa.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah Pengetahuan menganai faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelokasian dana desa.

1) Bagi Akademis

Bagi akademisi khususmya untuk peneliti selanjutnya hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis atau penelitian di bidang yang sama.

2) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah desa tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencegaahan *fraud* laporan keuangan desa dan dapat dijadikan referensi untuk menghindari *fraud* pada pengelolan keuangan desa.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

E. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika pembahasan terbagi menjadi beberapa bab antara lain sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat landasan teori, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran secara umum dari objek penelitian serta gambaran responden dan hasil analisis data beserta dengan penjabarannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. *Good Governance*

Teori *Good governance* pertama kali dipopulerkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1997 sebagai kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. UNDP mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola urusan publik secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kepentingan bersama.[21] Menurut UNDP (1997), terdapat sembilan prinsip utama *good governance*, yakni partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Kesembilan prinsip ini saling menopang satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, teori *good governance* memberikan kerangka normatif yang menjelaskan bagaimana pemerintah nagari seharusnya menjalankan amanah pengelolaan Alokasi Dana Desa. Prinsip transparansi menuntut keterbukaan informasi keuangan kepada seluruh warga nagari, sementara prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap aparatur nagari mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan anggaran kepada pemangku kepentingan. Adapun prinsip partisipasi mendorong keterlibatan aktif

[21] United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997), h. 2-4.

masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan program.[22] Relevansi teori *good governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan publik telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian.[23]

Hubungan antara teori *good governance* dengan ketiga variabel penelitian ini transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, transparansi merupakan salah satu dari sembilan prinsip utama *good governance* yang dirumuskan oleh UNDP. Dalam konteks pengelolaan alokasi dana desa, prinsip transparansi menuntut pemerintah nagari untuk menyediakan informasi keuangan yang terbuka, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Keterbukaan informasi ini menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif karena mendorong partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan anggaran, sehingga secara langsung berkontribusi pada pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa.[24]

Kedua, akuntabilitas merupakan prinsip *good governance* yang menegaskan kewajiban setiap aparatur pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan. Dalam kerangka *good governance*, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban formal administratif, melainkan sebagai komitmen moral aparatur nagari untuk menjalankan amanah pengelolaan keuangan desa secara jujur dan

[22] Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), h. 18-22.
[23] Megasyara, I., dan Imawan, A., "Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 13, No. 2, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), hal. 512–528, doi: 10.22219/jrak.v13i2.23525.
[24] United Nations Development Programme (UNDP), Governance for Sustainable Human Development (New York: UNDP, 1997), h. 2-4; Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), h. 18-22.

UIN IMAM BONJOL PADANG

bertanggung jawab. Lemahnya akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi salah satu faktor utama yang membuka peluang terjadinya kecurangan, sehingga penguatan prinsip akuntabilitas dalam kerangka *good governance* menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan fraud pengelolaan alokasi dana desa.[25]

Ketiga, pengendalian internal merupakan mekanisme operasional yang menjadi penjabaran konkret dari prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Apabila transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip normatif dalam kerangka *good governance*, maka pengendalian internal adalah sistem dan prosedur yang memastikan prinsip-prinsip tersebut terlaksana secara nyata dalam setiap aktivitas pengelolaan alokasi dana desa. Sistem pengendalian internal yang efektif menciptakan lingkungan tata kelola yang tidak kondusif bagi praktik kecurangan, karena setiap transaksi keuangan tunduk pada prosedur otorisasi, pemisahan tugas, dan pengawasan yang ketat. Dengan demikian, ketiga variabel transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal merupakan penjabaran operasional dari prinsip-prinsip *good governance* yang saling menopang dalam mewujudkan pengelolaan alokasi dana desa yang bersih dan bebas dari *fraud*.[26]

Secara keseluruhan, teori *good governance* memiliki kaitan yang erat dan langsung dengan variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu pencegahan *fraud*

[25] Mark Bovens, "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework," European Law Journal 13, no. 4 (2007), h. 447-468; LAN & BPKP, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Modul 3 dari 5 (Jakarta: LAN, 2000).

[26] Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Internal Control—Integrated Framework: Executive Summary (Durham: AICPA, 2013), h. 1-15; Megasyara, I. dan Imawan, A., "Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 13, No. 2 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), hal. 512-528.

UIN IMAM BONJOL PADANG

dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal secara simultan terbukti mampu menciptakan lingkungan tata kelola yang tidak kondusif bagi terjadinya tindakan kecurangan. Megasyara dan Imawan menegaskan bahwa implementasi *good government* yang mencakup partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terbukti menjadi upaya nyata dalam pencegahan *fraud*, karena upaya pencegahan *fraud* dilakukan dengan memastikan bahwa setiap kegiatan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diawasi secara aktif oleh seluruh pemangku kepentingan.[27] Lebih lanjut, Livia, Nursalma, dan Sari menemukan bahwa sistem pengendalian internal dan *good government governance* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, yang menegaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pencegahan kecurangan yang efektif di tingkat pemerintahan nagari.[28] Dengan demikian, teori *good governance* tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis bagi variabel-variabel independen (X1, X2, X3) dalam penelitian ini, tetapi juga menjadi kerangka normatif yang menjelaskan mengapa pencegahan *fraud* (Y) merupakan capaian yang harus diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap aspek pengelolaan Alokasi Dana Desa. Tanpa penerapan *good governance* yang konsisten, celah bagi

[27] Ira Megasyara dan Amrizal Imawan, "Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 13, No. 2 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), hal. 512–528. doi: 10.22219/jrak.v13i2.23525.

[28] Anesya Freni Livia, Nursalma, dan Meita Sekar Sari, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Good Government Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Pakuan Ratu Kab. Way Kanan)," AKUNTANSI 45, Vol. 5, No. 1 (2024), hal. 44–55. doi: 10.30640/akuntansi45.v5i1.2418.

terjadinya *fraud* dalam pengelolaan ADD akan tetap terbuka lebar dan sulit untuk dikurangi secara efektif.[29]

B. *Teori Fraud*

1. *Pengertian Fraud*

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan *fraud* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu seperti manipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain, yang dilakukan oleh orang dalam maupun luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain.[30] Dalam konteks sektor publik, *fraud* merupakan tindakan penipuan yang disengaja, umumnya digambarkan sebagai tipu daya, penyesatan, dan pencurian yang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan tingkat kecanggihan tertentu.[31] *Fraud* di sektor publik memiliki dampak yang lebih luas karena tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.[32]

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. *Konsep Fraud*

Konsep *Fraud* yang menjelaskan tiga faktor pemicu terjadinya *fraud* yaitu tekanan *(pressure)*, kesempatan *(opportunity)*, dan rasionalisasi *(rationalization)*.[33] Ketiga elemen ini saling berkaitan dan menjadi landasan untuk memahami

---

[29] Devi Nur Rahmah, Rudi Handoyono, dan Musyafa Al Farizi, "The Influence of Government Internal Control System and Good Governance on Fraud Prevention," Applied Accounting and Management Review (AAMAR), Vol. 4, No. 2 (2025). doi: 10.32497/aamar.v4i2.6773

[30] ACFE (2020) - Report to the Nations: definisi fraud menurut Association of Certified Fraud Examiners

[31] Tuanakotta (2010) - Buku "Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif" Edisi 2: pengertian fraud sebagai tindakan penipuan yang disengaja

[32] Christian & Veronica (2022) dari Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana: dampak fraud di sektor publik terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

[33] Donald R. Cressey, "Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement," Free Press, 1953, h. 30-45.

mengapa seseorang melakukan tindakan *fraud.* Tekanan merupakan motivasi seseorang untuk melakukan *fraud* yang umumnya berkaitan dengan masalah keuangan pribadi, gaya hidup, atau target yang tidak realistis.

Dalam konteks pemerintahan nagari, tekanan dapat bersumber dari kebutuhan ekonomi aparatur, tuntutan politik, atau target pembangunan yang sulit dicapai dengan anggaran yang tersedia. Rasionalisasi adalah pembenaran diri pelaku *fraud* untuk melegitimasi tindakannya. Pelaku seringkali tidak menganggap dirinya sebagai kriminal melainkan mencari alasan pembenar seperti "hanya meminjam sementara", "semua orang juga melakukan", atau "ini untuk kebaikan bersama". Pemahaman terhadap pola rasionalisasi ini penting untuk merancang strategi pencegahan fraud yang komprehensif.[34]

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud*

Menurut Christian & Veronica ada 3 yang tiga faktor pemicu terjadinya *fraud* yaitu sebagai berikut.[35]

a. Tekanan *(pressure)*

Tekanan merupakan kondisi yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, umumnya berasal dari kebutuhan finansial yang mendesak, gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan, atau adanya target kerja yang tidak realistis. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, tekanan dapat bersumber dari kebutuhan ekonomi aparatur nagari, tuntutan pihak tertentu, maupun ekspektasi

[34] Theodorus M. Tuanakotta, "Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif," Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2010, h. 207-212

[35] Christian dan Veronica, "Dampak Fraud di Sektor Publik terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat," Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 2022

UIN IMAM BONJOL PADANG

pembangunan yang melampaui kapasitas anggaran yang tersedia.

b. Kesempatan *(Opportunity)*

Kesempatan merujuk pada kondisi atau celah dalam sistem yang memungkinkan seseorang melakukan *fraud* tanpa terdeteksi. Faktor ini sangat erat kaitannya dengan lemahnya pengendalian internal, kurangnya pengawasan, serta rendahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Pada pemerintahan nagari, kesempatan terbuka lebar ketika pemisahan tugas tidak diterapkan dengan baik, otorisasi transaksi tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan mekanisme pengawasan dari pihak eksternal maupun internal tidak berfungsi secara optimal.

c. Rasionalisasi *(Rationalization)*

Rasionalisasi adalah proses pembenaran yang dilakukan pelaku *fraud* terhadap tindakannya sendiri. Pelaku pada umumnya tidak memandang dirinya sebagai seorang kriminal, melainkan mencari alasan yang dianggap logis untuk melegitimasi perbuatan tersebut, seperti anggapan bahwa dana yang digunakan hanya dipinjam sementara, bahwa tindakan serupa juga dilakukan oleh orang lain. Dalam lingkungan pemerintahan nagari, rasionalisasi dapat tumbuh subur ketika budaya organisasi tidak menjunjung tinggi integritas dan tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika, sehingga pelaku merasa tindakannya dapat dimaklumi.

4. Faktor yang mempengaruhi pencegahan *Fraud*

a. Menurut Aulia, Syamsuddin, dan Sahrir terdapat 3 faktor yang memengaruhi pencegahan Fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa, yaitu sebagai

UIN IMAM BONJOL PADANG

berikut.[36]

1) Moral Sensitivity

Moral sensitivity merupakan kemampuan seseorang dalam mengenali dan merasakan adanya dimensi etis dari suatu situasi yang dihadapi dalam pekerjaan. Dalam konteks pencegahan fraud pengelolaan alokasi dana desa, moral sensitivity berperan penting karena aparatur nagari yang memiliki kepekaan moral yang tinggi akan lebih mudah mengidentifikasi tindakan-tindakan yang berpotensi menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Aulia, Syamsuddin, dan Sahrir (2023) menemukan bahwa semakin tinggi moral sensitivity yang dimiliki oleh aparatur desa, semakin kuat pula komitmen mereka untuk menghindari praktik kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

2) Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah nagari dalam menyampaikan seluruh informasi keuangan kepada masyarakat secara jujur, lengkap, dan dapat diakses dengan mudah. Menurut Aulia, Syamsuddin, dan Sahrir (2023), penerapan transparansi yang konsisten dalam pengelolaan alokasi dana desa menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pencegahan fraud, karena setiap proses penggunaan anggaran dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat maupun pihak pengawas.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[36] Aulia F., Syamsuddin S., & Sahrir S., "Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 7 No. 3 (Juli 2023), h. 2112.

3) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur nagari untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan keputusannya dalam pengelolaan alokasi dana desa kepada pihak yang berwenang maupun kepada masyarakat. Aulia, Syamsuddin, dan Sahrir (2023) menegaskan bahwa akuntabilitas yang dijalankan secara sungguh-sungguh memberikan dampak nyata terhadap pencegahan fraud, karena adanya kewajiban pertanggungjawaban mendorong aparatur untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan akuntabilitas yang baik mencakup penyusunan laporan keuangan yang akurat, pelaksanaan forum pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta kepatuhan terhadap mekanisme pelaporan yang ditetapkan oleh regulasi.

b. Menurut Akhyaar, Purwantini, Afif, dan Prasetya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pencegahan Fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa, yaitu sebagai berikut.[37]

1) Kepatuhan pelaporan keuangan

Kepatuhan pelaporan keuangan merupakan ketaatan aparatur nagari dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar, format, dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhyaar, Purwantini, Afif, dan Prasetya menyatakan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan keuangan

[37] Akhyaar K., Purwantini A. H., Afif N., & Prasetya W. A., "Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa," KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol. 13 No. 2 (2022), h. 202.

UIN IMAM BONJOL PADANG

berperan signifikan dalam mendorong pencegahan fraud, karena laporan yang disusun secara tertib dan sesuai prosedur akan mempermudah proses audit dan deteksi penyimpangan oleh pihak pengawas.

2) Sistem pengendalian internal

Sistem pengendalian internal merupakan keseluruhan mekanisme, prosedur, dan kebijakan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, laporan keuangan dapat diandalkan, serta aset pemerintah nagari terlindungi dari penyalahgunaan. Akhyaar, Purwantini, Afif, dan Prasetya menekankan bahwa sistem pengendalian internal yang berjalan secara efektif merupakan faktor penentu dalam pencegahan fraud pengelolaan alokasi dana desa. Melalui pemisahan fungsi, prosedur otorisasi yang jelas, dan pengawasan berjenjang, sistem pengendalian internal mampu mempersempit celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kecurangan.

3) Whistleblowing system

Whistleblowing system merupakan mekanisme pelaporan pelanggaran yang memberikan saluran bagi aparatur nagari maupun masyarakat untuk melaporkan dugaan tindakan kecurangan kepada pihak yang berwenang secara aman dan terlindungi. Akhyaar, Purwantini, Afif, dan Prasetya menyatakan bahwa keberadaan whistleblowing system yang berfungsi secara efektif memberikan kontribusi nyata terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sistem ini mendorong terciptanya

UIN IMAM BONJOL PADANG

budaya keberanian untuk melaporkan penyimpangan, sekaligus memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berniat melakukan kecurangan karena potensi pelaporan menjadi lebih besar.

5. Indikator Pencegahan *Fraud*

Indikator pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa meliputi:[38]

a. Analisis Resiko

Proses mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan risiko terjadinya kecurangan (fraud) dalam suatu organisasi. Analisis risiko dilakukan untuk memahami potensi kelemahan atau celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan fraud, sehingga langkah-langkah pencegahan yang tepat dapat dirancang dan diterapkan secara efektif.

b. Implementasi

Penerapan kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian yang dirancang untuk mencegah terjadinya fraud dalam organisasi. Implementasi mencakup penyusunan kode etik, penetapan prosedur pelaporan kecurangan (whistleblowing), pelatihan kesadaran anti-fraud bagi seluruh karyawan, serta penerapan teknologi dan sistem yang mendukung pengawasan secara berkelanjutan

c. Hukuman

Penerapan sanksi atau konsekuensi tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan tindakan fraud, sebagai bentuk efek jera bagi pelaku maupun

[38] Susilowati COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting 7(6):8025-8038

UIN IMAM BONJOL PADANG

pencegahan bagi pihak lain yang berpotensi melakukan hal serupa. Hukuman mencakup penerapan sanksi administratif, sanksi finansial, hingga proses hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, penegakan sanksi secara konsisten dan tanpa pandang bulu (tidak diskriminatif), serta transparansi dalam proses penindakan agar dapat menumbuhkan kepercayaan dan efek jera di lingkungan organisasi.

d. Tinjauan

Evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap efektivitas program pencegahan fraud yang telah diterapkan. Tinjauan dilakukan melalui audit internal, reviu atas laporan keuangan, serta penilaian ulang terhadap prosedur dan kebijakan yang ada, guna memastikan bahwa upaya pencegahan fraud tetap relevan, mutakhir, dan mampu merespons potensi risiko yang berkembang.

C. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi dalam konteks pengelolaan keuangan publik merupakan keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atas pengelolaan dana publik. Transparansi adalah pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.[39] Konsep transparansi dalam pengelolaan keuangan desa

[39] Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik," Edisi Terbaru, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018, h. 30-35.

UIN IMAM BONJOL PADANG

memiliki makna yang lebih spesifik mengingat karakteristik pemerintahan desa yang sangat dekat dengan masyarakat.

Transparansi pengelolaan keuangan desa merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Prinsip ini mensyaratkan adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa.[40] Dalam penelitian yang dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Jembrana, ditemukan bahwa transparansi pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh komitmen kepala desa dan perangkat desa dalam menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa desa-desa yang memiliki tingkat transparansi tinggi cenderung memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih baik terhadap pemerintah desa. Substansi transparansi mencakup dua aspek fundamental. Pertama, aspek komunikasi publik oleh pemerintah tentang kebijakan yang diambil dan penggunaan dana publik. Kedua, aspek hak masyarakat terhadap akses informasi atas kebijakan dan pengelolaan dana publik tersebut. Kedua aspek ini saling berkaitan dan harus berjalan secara simultan untuk mewujudkan transparansi yang sesungguhnya dalam pengelolaan ADD.[41]

2. Prinsip-prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus mengacu

[40] Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, "Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah," Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat, 2017, h. 78-82.
[41] Indra Bastian, "Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa," Jakarta: Erlangga, 2015, h. 45-48.

UIN IMAM BONJOL PADANG

pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam berbagai regulasi dan literatur tata kelola pemerintahan yang baik. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat.

a. Prinsip pertama adalah keterbukaan informasi. Menurut Sujarweni (2015), keterbukaan informasi dalam pengelolaan ADD mencakup penyediaan informasi yang lengkap mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa. Informasi tersebut harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui berbagai media komunikasi yang tersedia di desa, seperti papan informasi desa, website desa, maupun forum-forum musyawarah desa.[42]

b. Prinsip kedua adalah partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa transparansi yang efektif terjadi ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Partisipasi ini bukan hanya bersifat simbolis, tetapi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan kontrol sosial.[43]

c. Prinsip ketiga adalah kemudahan akses informasi transparansi tidak akan bermakna jika informasi yang disediakan sulit diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memastikan bahwa informasi keuangan desa

[42] V. Wiratna Sujarweni, "Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa," Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, h. 68-73
[43] Anantawikrama Tungga Atmadja dan Ketut Adi Saputra, "Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa," Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis 13, no. 1 (2018): h. 7-20

UIN IMAM BONJOL PADANG

disajikan dalam format yang mudah dipahami dan dapat diakses melalui berbagai saluran komunikasi yang familiar bagi masyarakat desa.[44]

d. Prinsip keempat adalah ketepatan waktu penyampaian informasi. Menekankan bahwa informasi keuangan desa harus disampaikan secara berkala dan tepat waktu agar masyarakat dapat melakukan pengawasan yang efektif. Keterlambatan penyampaian informasi dapat mengurangi makna transparansi karena masyarakat kehilangan momentum untuk melakukan kontrol sosial.[45]

e. Prinsip kelima adalah kelengkapan informasi yang disampaikan. Informasi yang transparan harus mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan desa, tidak hanya yang bersifat positif tetapi juga kendala dan permasalahan yang dihadapi. Kelengkapan informasi ini memungkinkan masyarakat untuk memahami konteks pengelolaan keuangan desa secara utuh dan memberikan dukungan atau masukan yang konstruktif.[46]

3. Indikator Transparansi Pengelolaan ADD

Indikator transparansi pengelolaan dana desa meliputi:[47]

a. Kejelasan Informasi

Informasi yang disampaikan kepada publik harus jelas, akurat, dan mudah dipahami. Kejelasan informasi mencakup penyajian data keuangan, kebijakan, serta keputusan yang diambil oleh entitas secara lengkap dan tidak menyesatkan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[44] Harries Madiistriyatno Hasthoro dan Sunardi, "Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia," Jurnal Ekonomi dan Bisnis 19, no. 1 (2016): h. 53-68.
[45] Fatchan Achyani Arifiyanto dan Taufik Kurrohman, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember," Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan 2, no. 3 (2014): h. 473-485.
[46] Ayu Sri Mahatmi Widhiyaastuti Dewi dan Gede Adi Yuniarta Gayatri, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa," Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika 9, no. 1 (2019): h. 86-95.
[47] Sinta Suciana, C.Tri Widiastuti, Rita Meiriyanti,"Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Good Governance sebagai Variabel Intervening"

b. Kemudahan Akses

Informasi dan laporan yang dihasilkan oleh entitas harus dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Kemudahan akses dapat diwujudkan melalui publikasi informasi secara terbuka, baik melalui media cetak maupun platform digital yang tersedia

c. Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan. Keterlibatan masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan publik terwakili dan setiap keputusan yang diambil berlandaskan pada kebutuhan nyata masyarakat.

d. Proses Pengawasan

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal guna memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Proses pengawasan yang efektif mendorong akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan organisasi.

UIN IMAM BONJOL PADANG

D. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas memiliki makna yang lebih konkret karena hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat sangat dekat secara fisik maupun sosial. Pertanggung jawaban ini tidak hanya bersifat formal melalui

laporan tertulis, tetapi juga melalui forum-forum musyawarah desa yang melibatkan partisipasi masyarakat. Konsep akuntabilitas dalam sektor publik mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.[48] Definisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan sekadar pelaporan, tetapi melibatkan dialog dan mekanisme sanksi. Hal ini menunjukkan pentingnya aspek pengetahuan dan pemahaman dalam implementasi akuntabilitas. [49] Keseluruhan dimensi ini harus dipenuhi secara seimbang untuk mencapai akuntabilitas yang komprehensif dalam pengelolaan.

2. Bentuk-bentuk Akuntabilitas dalam Sektor Publik

Akuntabilitas dalam sektor publik memiliki berbagai bentuk yang saling melengkapi satu sama lain. Pemahaman tentang bentuk-bentuk akuntabilitas ini penting untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan dana publik dilakukan secara menyeluruh.[50]

a. akuntabilitas kejujuran dan hukum yang berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, kepatuhan terhadap hukum, dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang baik.
b. akuntabilitas proses yang berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
c. akuntabilitas program yang berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[48] Mark Bovens, "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework," European Law Journal 13, no. 4 (2007): h. 447-468..
[49] Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 387.
[50] Elwood S. Buffa yang dikutip dalam Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), h. 22.

alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal.

d. akuntabilitas kebijakan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat luas.Dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, ditemukan bahwa bentuk akuntabilitas yang paling sering diabaikan adalah akuntabilitas program. Banyak desa yang sudah baik dalam pelaporan administratif dan keuangan, namun lemah dalam menunjukkan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.

Temuan ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap akuntabilitas berbasis kinerja, bukan hanya akuntabilitas administratif.[51] Perspektif lain dikemukakan akuntabilitas menjadi lima macam. Pertama, akuntabilitas finansial yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kedua, akuntabilitas manajerial yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif.[52]

UIN IMAM BONJOL PADANG

Ketiga, akuntabilitas program yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Keempat, akuntabilitas proses yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan prosedur kerja yang tepat, standar etika, dan standar moral dalam memberikan pelayanan publik. Kelima, akuntabilitas hukum yang berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

[51] Evi Dwi Astuty dan Evana Hadi Fanida, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dharma Bhakti Kecamatan Sungai Raya," Jurnal Administrasi Publik 1, no. 4 (2013): h. 673-687.
[52] Ryaas Rasyid, "Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan," Jurnal Ilmu Politik 9, no. 2 (1998): h. 15-28.

lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Studi menunjukkan bahwa implementasi berbagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa masih menghadapi kendala, terutama terkait kapasitas aparatur desa. Banyak aparatur desa yang memahami akuntabilitas sebatas pembuatan laporan keuangan, tanpa memahami akuntabilitas dalam dimensi yang lebih luas seperti akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas kebijakan.[53]

3. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan ADD

Indikator akuntabilitas meliputi :[54]

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas yang berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan atau wewenang, serta memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil senantiasa sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku

b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas yang berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah baik, mencakup kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, serta prosedur administrasi yang dilaksanakan oleh organisasi.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas yang memberikan pertimbangan mengenai tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak, serta apakah program yang telah dilaksanakan

[53] Nurdiono, Biana Adha Inapty, dan Ari Kamayanti, "Pengelolaan Dana Desa: Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat," Jurnal Akuntansi Multiparadigma 10, no. 2 (2019): h. 336-352.

[54] Silvana Aprianti, Nur Fadjrih Asyik, PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN Volume 9, Nomor 12, Desember 2020 h 5

UIN IMAM BONJOL PADANG

memiliki hasil yang efektif dan efisien sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah atau lembaga terkait kepada publik atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan dijalankan, sehingga setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan manfaat serta dampaknya kepada masyarakat.

E. Pengendalian Internal

1. Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan mekanisme yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks pemerintahan desa, pengendalian internal menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan ADD dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencapai tujuan yang ditetapkan.[55]

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.[56] Definisi ini menekankan aspek proteksi dan produktivitas dalam

UIN IMAM BONJOL PADANG

[55] Arif Widyatama, Lola Novita, dan Diarespati, "Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa," Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan 7, no. 1 (2017): h. 1-10.
[56] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

pengelolaan sumber daya desa.[57] Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa desa-desa yang memiliki sistem pengendalian internal yang baik cenderung memiliki tingkat penyimpangan yang lebih rendah dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Tujuan dan Fungsi Pengendalian Internal

Pengendalian internal memiliki tujuan dan fungsi yang strategis dalam menjamin pengelolaan ADD yang baik. Pemahaman tentang tujuan dan fungsi ini penting bagi penyelenggara pemerintahan desa agar dapat merancang dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang efektif. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, tujuan pengendalian internal pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat tujuan ini saling terkait dan harus dicapai secara simultan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Bastian menguraikan bahwa tujuan pertama yaitu efektivitas dan efisiensi berkaitan dengan pencapaian hasil kerja yang optimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Tujuan kedua yaitu keandalan pelaporan keuangan berkaitan dengan jaminan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan akurat, lengkap, dan tepat waktu. Tujuan ketiga yaitu pengamanan aset berkaitan dengan perlindungan terhadap kehilangan, penyalahgunaan, atau kerusakan aset. Tujuan keempat yaitu ketaatan terhadap

[57] Endang Susilowati, Ratminto, dan Nunuk Puji Rahayu, "Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa," Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 22, no. 1 (2018): h. 1-14.

UIN IMAM BONJOL PADANG

peraturan berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku.[58]

Fungsi pengendalian internal dalam pengelolaan ADD sangat beragam. pengendalian internal meliputi: fungsi preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan, fungsi detektif untuk menemukan penyimpangan yang terjadi, fungsi korektif untuk memperbaiki penyimpangan, dan fungsi directive untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan. [59] Studi menunjukkan bahwa fungsi preventif pengendalian internal paling efektif dalam mencegah *fraud* pada pengelolaan dana desa.[60] Penelitian tersebut menemukan bahwa desa-desa yang menerapkan pengendalian preventif yang kuat seperti segregasi tugas dan otorisasi yang jelas memiliki tingkat kecurangan yang jauh lebih rendah dibandingkan desa yang hanya mengandalkan pengendalian detektif.

3. Komponen Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang efektif harus memiliki komponen-komponen yang saling terkait dan mendukung satu sama lain:[61]

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari seluruh komponen pengendalian internal. lingkungan pengendalian mencakup sikap manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian dalam organisasi. Komponen ini mencakup integritas, nilai etika, kompetensi personel, filosofi dan gaya operasi

UIN IMAM BONJOL PADANG

[58] Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 412.
[59] Adi Wirawan Atmadja dan Komang Adi Saputra, "Determinan Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa," Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis 13, no. 1 (2018): h. 1-14.
[60] Jajang Herdiansah, Dwi Kartini, dan Ratih Hendriyani, "Efektivitas Pengendalian Internal dalam Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Dana Desa," Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer 12, no. 1 (2020): h. 23-35.
[61] Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Internal Control - Integrated Framework (Durham: AICPA, 2013), h. 3.

manajemen, serta perhatian dan arahan yang diberikan oleh dewan komisaris.[62] Dalam konteks pemerintahan desa, Susilowati menjelaskan bahwa lingkungan pengendalian mencakup komitmen kepala desa terhadap integritas dan etika, struktur organisasi pemerintah desa yang jelas, pembagian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang sehat, serta pengawasan yang efektif oleh BPD.[63]

Penelitian tersebut menemukan bahwa lingkungan pengendalian yang kuat sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa yang berintegritas. Dan juga menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian yang lemah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Desa-desa yang kepala desanya tidak memberikan contoh perilaku etis cenderung memiliki aparatur yang juga kurang peduli terhadap pengendalian internal.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses identifikasi dan analisis risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, penilaian risiko untuk tujuan pengendalian intern pemerintah mencakup identifikasi risiko, analisis risiko, dan manajemen atas perubahan.[64] Dalam pengelolaan ADD, penilaian risiko harus mencakup identifikasi risiko eksternal seperti perubahan regulasi, kondisi ekonomi, dan bencana alam, serta risiko internal seperti kesalahan pencatatan, penyalahgunaan aset, dan ketidakpatuhan terhadap prosedur.[65]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[62] Theodorus M. Tuanakotta, Audit Berbasis ISA (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 130.
[63] Endang Susilowati, Ratminto, dan Nunuk Puji Rahayu, "Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa," Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 22, no. 1 (2018): h. 6.
[64] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
[65] Kasidi, Manajemen Risiko (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 4

Setelah risiko diidentifikasi, perlu dilakukan analisis untuk menentukan signifikansi dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Studi juga menemukan bahwa mayoritas pemerintah desa belum melakukan penilaian risiko secara sistematis dalam pengelolaan dana desa. Ketiadaan penilaian risiko ini menyebabkan pemerintah desa tidak memiliki antisipasi yang memadai terhadap potensi masalah yang dapat menghambat pencapaian tujuan program.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengurangi risiko dan memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Pengendalian seperti review atas kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.[66] Dalam pengelolaan ADD,pentingnya aktivitas pengendalian yang mencakup: otorisasi yang tepat atas transaksi dan kejadian, pemisahan tugas yang mengurangi kesempatan terjadinya kesalahan atau kecurangan, desain dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, perlindungan yang cukup terhadap akses dan penggunaan aset dan catatan, serta pengecekan independen atas pelaksanaan kegiatan.[67] aktivitas pengendalian yang paling sering diabaikan dalam pengelolaan dana desa adalah pemisahan tugas. Banyak desa yang merangkap tugas sehingga satu orang memiliki wewenang otorisasi sekaligus pelaksanaan, yang meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan komponen pengendalian internal

[66] Theodorus M. Tuanakotta, Audit Berbasis ISA (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 145.
[67] Vivin Maharani Ekowati Sujarweni, Akuntansi Desa (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 102.

yang berfungsi untuk menjamin bahwa data dan informasi yang relevan dapat diidentifikasi, direkam, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat, sehingga memungkinkan setiap pihak dalam organisasi menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.[68] Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, informasi dan komunikasi dalam sistem pengendalian intern pemerintah diselenggarakan secara efektif agar dapat mendukung pengambilan keputusan manajemen dan pihak-pihak lain dalam organisasi, baik dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab operasional, pelaporan keuangan, maupun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.[69]

e. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penilaian terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian internal sepanjang waktu, yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengendalian tetap berjalan sebagaimana mestinya dan mampu merespons perubahan kondisi.[70] Pemantauan dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pemantauan berkelanjutan (ongoing monitoring) yang terintegrasi dalam aktivitas operasional rutin, dan evaluasi terpisah (separate evaluation) yang dilakukan secara periodik oleh pihak yang independen dari kegiatan yang diawasi. PP Nomor 60 Tahun 2008 menegaskan bahwa pemantauan sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta reviu lainnya.[71]

4. Indikator Pengendalian Internal

[68] Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Internal Control – Integrated Framework, 2013.
[69] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 41.
[70] COSO, Internal Control – Integrated Framework, 2013.
Ibid.
[71] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 43.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pengendalian internal meliputi :[72]

a. Lingkungan Pengendalian

Suatu hal yang dilakuan dalam melakukan dan menerpakan sistem pengendalian internal yang ada.

b. Penilaian Resiko

Melakukan identifikasi sebauh entitas dan melakukan analisis terhadap terjadinya risiko yang baik untuk mendapatkan sebuah tujuan, mebentuk sebuah dasar untuk mengetahui bagaimana sebuah risiko harus dikelola.Pencatatan dan dokumentasi yang lengkap

c. Kegiatan Pengendalian

Kebijakan atau prosedur yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan dengan baik.Evaluasi kinerja dan reviu secara berkala

d. Informasi dan Kumunikasi

Pengindentifikasian, penangkapan, dan pertukarann informasi yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka..

e. Pemantaun

proses untuk meenntukan mutu kinerja pengendalian internal. Pemantauan terdiri dari penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi

[72] Jurnal Akuntansi dan Keuangan Mimi Nurhidayanti, Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan KecuranganVol. 1 No. 1 September 2025 Hal. 23-30

UIN IMAM BONJOL PADANG

F. KajianTerdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Nama Jurnal & Identitas	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023)	Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 7 No. 3, Juli 2023, hlm. 2112–2120	**Persamaan:** 1. Variabel X = Transparansi dan Akuntabilitas *2. Variabel Y = Pencegahan Fraud* 3. Objek = Pengelolaan Alokasi Dana Desa 4. Metode = Kuantitatif **Perbedaan:** 1. Tidak menggunakan variabel Pengendalian Internal 2. Menambahkan variabel Moral Sensitivity 3. Lokasi penelitian di Kecamatan Masamba, Sulawesi Selatan	Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa. Moral sensitivity tidak berpengaruh signifikan.
2	Noya, J., Silooy, R. W., & Limba, F. B. (2023)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan	Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen, Vol. 2 No. 4, 2023, hlm.	**Persamaan:** 1. Variabel X = Pengendalian Internal *2. Variabel Y = Pencegahan Fraud*	Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan

		Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Desa-desa di Kecamatan Saparua)	278–292	*Dana Desa* 3. Metode = Kuantitatif 4. Objek = Pengelolaan Dana Desa **Perbedaan:** 1. Tidak menggunakan variabel Transparansi dan Akuntabilitas 2. Menambahkan Moralitas sebagai variabel moderasi 3. Lokasi penelitian di Kecamatan Saparua, Maluku	terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Moralitas memperkuat hubungan tersebut sebagai variabel moderasi.
3	Akhyaar, K., Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022)	Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa	KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol. 13 No. 2, 2022, hlm. 202–217	**Persamaan:** 1. Variabel X = Sistem Pengendalian Internal *2. Variabel Y = Pencegahan Fraud Dana Desa* 3. Metode = Kuantitatif 4. Objek = Pengelolaan Dana Desa **Perbedaan:** 1. Tidak menggunakan variabel Transparansi dan Akuntabilitas *2. Menambahkan variabel Kepatuhan*	Kepatuhan pelaporan keuangan dan whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan.

				Pelaporan dan Whistleblowing System 3. Lokasi penelitian berbeda	
4	Lusiana, F., Aziz, N., & Idawati, W. (2025)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening	Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 23 No. 2, 2022, hlm. 1–15. STIE AAS Surakarta	**Persamaan:** 1. Variabel X = Pengendalian Internal dan Akuntabilitas *2. Variabel Y = Pencegahan Fraud Dana Desa* 3. Objek = Pengelolaan Dana Desa 4. Metode = Kuantitatif **Perbedaan:** 1. Tidak menggunakan variabel Transparansi secara eksplisit 2. Menambahkan variabel Kompetensi Aparatur Desa 3. Lokasi penelitian di Kecamatan Aimas, Sorong	Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dan pencegahan fraud. Kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Akuntabilitas terbukti sebagai variabel intervening antara pengendalian intern dan pencegahan fraud.
5	Murtin, A., Indrasari, B. A., & Putra, A. Z. (2024)	Faktor-faktor yang Memengaruhi Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa	Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 8 No. 1, Mei 2024, hlm. 75–86. Universitas Muhammadiyah	**Persamaan:** 1. Variabel X = Akuntabilitas dan Pengendalian Internal *2. Variabel Y = Pencegahan Fraud Dana Desa*	Akuntabilitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap

			Yogyakarta	3. Objek = Pengelolaan Dana Desa 4. Metode = Kuantitatif **Perbedaan:** 1. Tidak menggunakan variabel Transparansi secara eksplisit 2. Menambahkan variabel Moralitas Pegawai 3. Lokasi penelitian berbeda	pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Moralitas pegawai juga terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.
6	Susandya, A. A. P. G. B. A., Putra, M. D. P., Bagiana, I. K., Cahyani, M. R., & Aristanti, I. A. P. M. P. (2022)	Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa	Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 12 No. 3, 2022. Universitas Muhammadiyah Malang	**Persamaan:** 1. Variabel X = Pengendalian Internal dan Akuntabilitas (Integritas) *2. Variabel Y = Pencegahan Fraud* 3. Objek = Pengelolaan Alokasi Dana Desa 4. Metode = Kuantitatif **Perbedaan:** 1. Tidak secara spesifik menggunakan variabel Transparansi 2. Menambahkan variabel Kompetensi, Moralitas, dan Budaya Organisasi	Kompetensi, moralitas, integritas, pengendalian internal, dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam alokasi dana desa.

				3. Lokasi penelitian di Kota Denpasar, Bali	
7	Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten)	Jurnal Akuntansi Trisakti, Vol. 9 No. 2, September 2022, hlm. 327–340	**Persamaan:** 1. Variabel X = Praktik Akuntabilitas *2. Variabel Y = Pencegahan Fraud Dana Desa* 3. Objek = Pengelolaan Dana Desa 4. Metode = Kuantitatif **Perbedaan:** 1. Tidak menggunakan variabel Transparansi dan Pengendalian Internal secara eksplisit *2. Menambahkan variabel Kompetensi Aparatur, Moralitas, Budaya Organisasi, Whistleblowing* 3. Lokasi penelitian di Kecamatan Prambanan, Klaten	Kompetensi aparatur, moralitas individu, budaya organisasi, praktik akuntabilitas, dan whistleblowing secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.
8	Megasyara, I. & Imawan, A. (2023)	Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 13 No. 2, 2023, hlm. 512–528	**Persamaan:** *1. Fokus pada pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa* 2. Mencakup aspek	Implementasi prinsip good government yang mencakup transparansi dan akuntabilitas

				transparansi dan akuntabilitas 3. Metode = Kuantitatif 4. Objek = Pengelolaan Keuangan Desa **Perbedaan:** *1. Menggunakan pendekatan Good Government, tidak secara spesifik mengukur transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal sebagai variabel* 2. Lokasi penelitian berbeda 3. Periode penelitian berbeda	terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
9.	Ruzain, M., Novianti, N., & Amrullah, M. M. (2024)	Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dengan Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Bireuen)	Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), Vol. 3 No. 2, 2024, hlm. 1–15.	**Persamaan:** 1. Variabel X = Pengendalian Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas 2. Variabel Y = Pencegahan Fraud 3. Metode = Kuantitatif **Perbedaan:** 1. Transparansi dan Akuntabilitas digunakan sebagai	Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Transparansi dan akuntabilitas terbukti memediasi hubungan antara pengendalian internal dan pencegahan fraud secara signifikan di SKPD Kabupaten

				variabel intervening, bukan variabel independen 2. Objek penelitian di SKPD Kabupaten Bireuen, bukan pengelolaan dana desa 3. Lokasi penelitian di Kabupaten Bireuen, Aceh	Bireuen.
10.	Fitriana, N., Paramarta, V., & Santoso, R. A. (2024)	Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta Tahun 2020-2024	Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 4 No. 3, 2024, hlm. 16285–16302.	**Persamaan:** 1. Variabel X = Pengendalian Internal dan Akuntabilitas 2. Variabel Y = Pencegahan Fraud Dana Desa 3. Objek = Pengelolaan Dana Desa **Perbedaan:** 1. Tidak menggunakan variabel Transparansi secara eksplisit 2. Menggunakan metode literature review, bukan survei lapangan 3. Cakupan nasional, tidak spesifik satu lokasi	Dari 25 artikel terindeks Sinta, pengendalian internal berpengaruh pada pencegahan fraud (18 artikel mendukung, 4 tidak). Akuntabilitas terbukti berkontribusi positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.
11	Firda Setya Anggeli & Andajani (2024)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 13 No. 1, 2024	Persamaan: Variabel X = Transparansi dan Akuntabilitas; objek = pengelolaan dana	Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap

				desa; metode kuantitatif. Perbedaan: Variabel Y = pengelolaan dana desa (bukan pencegahan fraud); tidak memakai variabel pengendalian internal.	pengelolaan dana desa, meski besarnya pengaruh bervariasi menurut konteks penerapan. Keterangan: Sejalan (mendukung pengaruh transparansi)
12	E. Julita & S. Abdullah (2020)	Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 213–221	Persamaan: Variabel X = Transparansi; Y berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana; objek = dana desa. Perbedaan: Tidak memakai variabel Akuntabilitas dan Pengendalian Internal; lokasi di Kec. Sukakarya, Kota Sabang.	Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan karena laporan yang disusun dan dipublikasikan rutin mengurangi risiko manipulasi data. Keterangan: Sejalan
13	Wildayanti SD, Rio Monoarfa, & Usman Usman (2023)	Pengaruh Pengendalian Internal dan Transparansi terhadap Pencegahan Kecurangan pada Laporan Keuangan	Jurnal Mirai Management, Vol. 8 No. 2, 2023, hlm. 115–122	Persamaan: Variabel X = Pengendalian Internal dan Transparansi; Y = Pencegahan Kecurangan; metode kuantitatif (kuesioner, regresi berganda). Perbedaan: Tidak memakai variabel Akuntabilitas; objek = laporan keuangan desa secara umum.	Transparansi dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan pada laporan keuangan desa. Keterangan: Sejalan (mendukung Transparansi & Pengendalian Internal)
14	Mauliza Risma, Hendra Raza, Murhaban, & Ikhyanuddin (2024)	Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dengan Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bireuen)	Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), Vol. 3 No. 2, 2024, hlm. 218–241	Persamaan: Variabel X = Pengendalian Internal; Transparansi & Akuntabilitas = variabel intervening; Y = Pencegahan Fraud. Perbedaan: Transparansi/Akuntabilitas berperan sebagai variabel intervening, bukan independen; objek = SKPD Kabupaten Bireuen, bukan dana desa.	Transparansi sebagai variabel intervening tidak berpengaruh terhadap pengendalian internal maupun pencegahan fraud, sedangkan akuntabilitas justru berpengaruh terhadap pengendalian internal dan pencegahan fraud. Keterangan: Tidak sejalan (Transparansi);

UIN IMAM BONJOL PADANG

					Tidak sejalan (Akuntabilitas)
15	Elisa Rama Yanti, Wiralestari, & Wiwik Tiswiyanti (2023)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh)	Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu), Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 53–64	Persamaan: Variabel X = Transparansi dan Akuntabilitas; objek = pengelolaan keuangan desa. Perbedaan: Menambahkan variabel Partisipasi Masyarakat; Y = pengelolaan keuangan desa, bukan pencegahan fraud.	Transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sementara akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan. Keterangan: Tidak sejalan (Transparansi)
16	Aulia Rakhma Larasati Putri & Maryono (2022)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa	Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4 No. 3, 2022, hlm. 1668–1688	Persamaan: Variabel X = Transparansi dan Akuntabilitas; objek = pengelolaan dana desa. Perbedaan: Menambahkan variabel Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparat Desa; Y = pengelolaan dana desa.	Tidak ditemukan bukti bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, karena penyediaan informasi keuangan masih bersifat formalitas administratif. Keterangan: Tidak sejalan
17	D. A. Utama, R. Sitawati, & Subehan (2022)	Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud, dengan Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening	JRAK, Vol. 18 No. 2, 2022, hlm. 109–124	Persamaan: Variabel X = Pengendalian Internal; Akuntabilitas = variabel intervening; Y = Pencegahan Fraud. Perbedaan: Akuntabilitas diposisikan sebagai variabel intervening, bukan independen.	Akuntabilitas tidak memberikan pengaruh yang mendukung upaya pencegahan fraud apabila tidak dibarengi pengawasan dan penegakan yang konsisten. Keterangan: Sejalan
18	Gregorius Jeandry, Amin Dara, & Zainuddin (2024)	Pengelolaan Dana Desa Bebas Fraud: Pendekatan Efektif di Kecamatan Tidore Utara	Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 1125–1142	Persamaan: Variabel X = Akuntabilitas; Y = Pencegahan Fraud; objek = pengelolaan dana desa. Perbedaan: Menyertakan Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian sebagai variabel pendukung; lokasi di Kec. Tidore	Arah koefisien regresi akuntabilitas negatif terhadap pencegahan fraud, terutama bila tidak dibarengi kompetensi aparatur dan sistem pengendalian yang memadai. Keterangan: Sejalan

UIN IMAM BONJOL PADANG

				Utara.	
19	Patricia Linda Surbakti (2026)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dalam Upaya Pencegahan Fraud pada Pengelolaan BLT Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pandayora Kabupaten Poso dengan SPI sebagai Variabel Moderasi (2023–2024)	Global Accounting, Vol. 5 No. 1, 2026	Persamaan: Variabel X = Akuntabilitas dan Transparansi; melibatkan Pengendalian Internal. Perbedaan: Y = kinerja pemerintah desa (bukan pencegahan fraud langsung); Pengendalian Internal sebagai variabel moderasi.	Akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan BLT dana desa; akuntabilitas yang bersifat formalitas belum tentu meningkatkan efektivitas tata kelola. Keterangan: Sejalan
20	M. E. Sari, F. I. Arza, & S. Taqwa (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Intern terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa	Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 1 No. 3, 2019, hlm. 1443–1457	Persamaan: Variabel X = Akuntabilitas dan Pengendalian Intern; Y = potensi kecurangan dana desa. Perbedaan: Menambahkan variabel Kesesuaian Kompensasi; lokasi di Kabupaten Kulon Progo.	Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap penurunan potensi kecurangan dana desa; ketika aparatur dituntut konsisten bertanggung jawab, ruang penyimpangan makin sempit. Keterangan: Tidak sejalan
21	N. K. R. Eldayanti, S. A. A. Indraswarawati, & N. W. Yuniasih (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Hita Akuntansi dan Keuangan, 2020	Persamaan: Variabel X = Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas; Y = Pencegahan Fraud; objek = keuangan desa. Perbedaan: Menambahkan variabel Kompetensi Aparatur Desa dan Integritas.	Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, didukung penguatan integritas dan kompetensi aparatur. Keterangan: Tidak sejalan
22	T. Suwarsa & C. Sianipar (2024)	Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Bank BJB Cabang Sukajadi	LAND Journal, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 203–214	Persamaan: Variabel X = Pengendalian Internal; Y = Pencegahan Fraud. Perbedaan: Objek penelitian perbankan (Bank BJB Cabang Sukajadi), bukan pengelolaan dana/keuangan desa.	Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pada berbagai jenis organisasi. Keterangan: Sejalan
23	S. Herlita & B. I. Bayunitri (2021)	Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan	2021	Persamaan: Variabel X = Pengendalian Internal; Y =	Efektivitas pengendalian internal berperan

UIN IMAM BONJOL PADANG

		(Studi Kasus pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung)		Pencegahan Kecurangan. Perbedaan: Objek penelitian perusahaan BUMN (PT. Dirgantara Indonesia), bukan pengelolaan dana desa.	penting dalam menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan curang. Keterangan: Sejalan
24	Anantawikrama Tungga Atmadja & Adi Kurniawan Saputra (2017)	Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 12 No. 1, 2017, hlm. 7–16	Persamaan: Variabel X = Kompetensi Personel dan Sistem Pengendalian Internal; Y = Pencegahan Fraud; objek = keuangan desa. Perbedaan: Menambahkan variabel Kompetensi Personel.	Kompetensi personel dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Keterangan: Sejalan
25	Gresitas Mahar Kristuti, Firda Ayu Amalia, & Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono (2023)	Determinan Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 23 No. 1, 2023	Persamaan: Variabel X = Sistem Pengendalian Internal; Y = Pencegahan Fraud; objek = alokasi dana desa. Perbedaan: Menambahkan variabel Spiritualitas dan Kepercayaan Antarpersonel; lokasi di Kec. Banyakan.	Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud; spiritualitas dan kepercayaan antarpersonel justru lebih berperan. Keterangan: Tidak sejalan
26	S. Ayem & K. F. Kusumasari (2020)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Mediasi	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 10 No. 2, 2020, hlm. 160–169	Persamaan: Variabel X = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Y = Pencegahan Fraud; objek = dana desa. Perbedaan: Akuntabilitas diposisikan sebagai variabel mediasi.	SPIP tidak berpengaruh langsung terhadap pencegahan fraud, dan baru berpengaruh signifikan apabila dimediasi oleh akuntabilitas. Keterangan: Tidak sejalan (secara langsung)
27	Triawan Hidayat & Heni Susilowati (2026)	Pencegahan Fraud Dana Desa Melalui Kepatuhan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus di Kecamatan Delanggu	Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 6 No. 1, 2026, hlm. 115–126	Persamaan: Variabel X = Sistem Pengendalian Internal; Y = Pencegahan Fraud Dana Desa. Perbedaan: Menambahkan variabel Kepatuhan	Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan

				Pelaporan Keuangan; lokasi di Kec. Delanggu.	Delanggu. Keterangan: Tidak sejalan

G. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun dengan menggunakan variabel independen yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan pengendalian internal. Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah *pencegahan fraud*. Hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat pada

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir

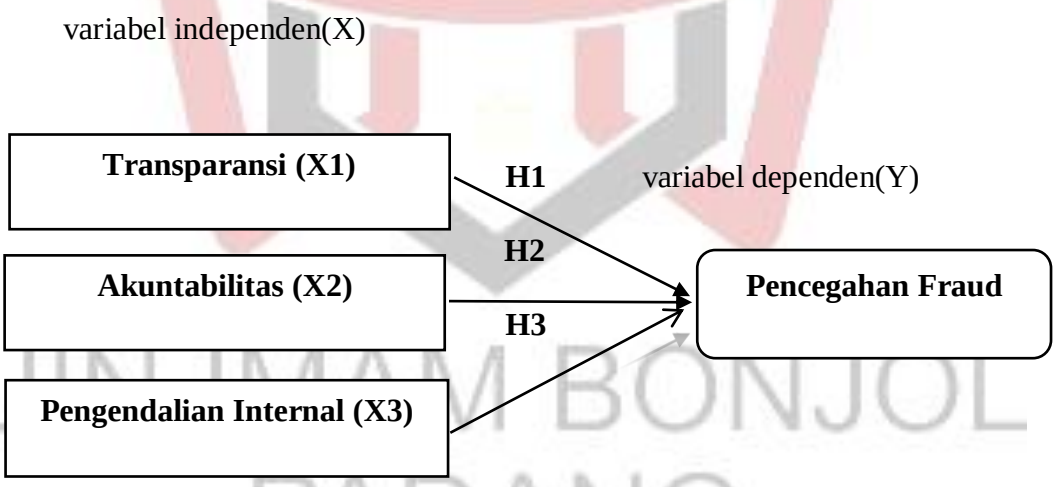

H. Hipotesisi Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang ada, dimana kebenarannya masih perlu dikaji dan diteliti melalui data-data yang dikumpulkan. Berikut ini adalah hipotesis pada penelitian ini:

1. Pengaruh Transparansi terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengolaan alokas dana desa.

UNIVERSITAS ISLAM BONJOL PADANG

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menuntut pemerintah nagari untuk menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipantau dan diawasi secara langsung. Keterbukaan informasi ini menjadi salah satu mekanisme penting yang dapat mempersempit peluang terjadinya kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa.[73]

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Aulia, Syamsuddin, dan Sahrir yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa. Semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan aparat nagari, semakin kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan alokasi dana desa.[74]

H1: DidugaTransparansi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa.

2. Pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Akuntabilitas mengharuskan setiap aparat nagari untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat dan pihak berwenang. Apabila akuntabilitas diterapkan dengan sungguh-sungguh, maka potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir karena setiap pihak menyadari bahwa tindakannya

[73] Fransiska Rahayu dkk., "Upaya Pencegahan Kecurangan dalam Mengelola Dana Desa Sesuai dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi," Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8, No. 2 (2021), h. 130.
[74] Firda Aulia, Syamsuddin, dan Sahrir, "Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 3 (2023), h. 2116.

dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.[75]

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Saputra dkk. yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh Positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi akuntabilitas yang dimiliki aparat nagari, semakin tinggi pula kemampuannya dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa.[76]

H2: Diduga Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa

3. Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa

Pengendalian internal merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengelolaan keuangan dapat tercapai secara efektif dan efisien, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan. Sistem pengendalian internal yang kuat akan mempersulit pelaku fraud untuk menemukan celah dalam proses pengelolaan alokasi dana desa.[77] Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Noya, Silooy, dan Limba yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan pengendalian internal di lingkungan

[75] Fransiska Rahayu dkk., "Upaya Pencegahan Kecurangan dalam Mengelola Dana Desa Sesuai dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi," Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8, No. 2 (2021), h. 131.
[76] K.A.K. Saputra dkk., "Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa," Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol. 10, No. 2 (2019), h. 172.
[77] Putu Santi Putri Laksmi dan I Ketut Sujana, "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 29, No. 3 (2019), h. 1120.

UIN IMAM BONJOL PADANG

pemerintah nagari, semakin efektif upaya pencegahan kecurangan yang dihasilkan dalam pengelolaan alokasi dana desa.[78]

H3: **Diduga Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa**

UIN IMAM BONJOL
PADANG

[78] Julio Noya, Revi Wilhelmina Silooy, dan Franco Benony Limba, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Desa-desa di Kecamatan Saparua)," Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, Vol. 2, No. 4 (2023), h. 285.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal terhadap variabel dependen pencegahan fraud..

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kantor-kantor Wali Nagari yang berada di wilayah Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kecamatan IV Jurai merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah nagari cukup banyak dengan nilai alokasi dana desa yang signifikan, sehingga relevan untuk dikaji tata kelola keuangannya. Kedua, terdapat indikasi kerentanan terhadap praktik penyimpangan dalam pengelolaan alokasi dana desa di beberapa nagari, yang menjadikan lokasi ini penting untuk diteliti dari perspektif pencegahan fraud. Ketiga, aksesibilitas peneliti terhadap data dan informan di lokasi ini memungkinkan pengumpulan data primer yang valid dan representatif, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memenuhi syarat-syarat kriteria pada penelitian ini yang mana kriteria nya itu ialah yang besinggungan langsung atau yang berwenang terhadap 4 variabel yaitu Transparansi, Akuntabilitas,Pengendalian Internal dan Pencegahan Fraud, pada penelitian ini yang bersinggungan langsung ialah wali nagari, sekretaris nagari, bendahara nagari dan ketua badan musyawarah nagari (BAMUS) dimana terdapat 20 nagari sehingga populasinya nya adalah 4x jumlah nagari Dalam artian sebayak 80 populasi.

Tabel 3.1

No	Nama Nagari
1	Nagari Painan
2	Nagari Painan Selatan
3	Nagari Painan Timur
4	Nagari Salido
5	Nagari Tambang
6	Nagari Lumpo
7	Nagari Bukik Kaciak Lumpo
8	Nagari Sungai Sariak Lumpo

UIN IMAM BONJOL PADANG

9	Nagari Gunung Bungkuak Lumpo
10	Nagari Ampang Tareh Lumpo
11	Nagari Ampuan Lumpo
12	Nagari Balai Sinayan
13	Nagari Bungo Pasang Salido
14	Nagari Salido Sari Bulan
15	Nagari Sago Salido
16	Nagari Koto Rawang
17	Nagari Taratak Tangah Lumpo
18	Nagari Batu Kunik Lumpo
19	Nagari Limau Gadang Lumpo
20	Nagari Sungai Gayo Lumpo

2. Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wali nagari, sekretaris nagari dan bendahara nagari serta ketua badan musyawarah nagari (Bamus). Maka seluruh jumlah responden 80 dari 20 Kantor Wali Nagari yang berada di Kecamatan Koto IV Jurai.

3. **Sampel Penelitian**

Berdasarkan metode pengambilan sampel diatas maka diketahu jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 80, karena berasal dari wali nagari, sekretaris

UIN IMAM BONJOL PADANG

nagari, bendahara nagari dan ketua badan musyawarah nagari, dimana terdapat 20 nagari sehingga total nya adalah 80 sampel/responden.

Tabel 3.2

Sampel Nagari Penelitian

No	Nama Nagari	Kategori	Jumlah Responden
1	Nagari Painan	Alokasi Tinggi	4
2	Nagari Salido	Alokasi Tinggi	4
3	Nagari Painan Selatan	Alokasi Tinggi	4
4	Nagari Painan Timur	Alokasi Tinggi	4
5	Nagari Lumpo	Alokasi Tinggi	4
6	Nagari Sago Salido	Alokasi Sedang	4
7	Nagari Bungo Pasang Salido	Alokasi Sedang	4
8	Nagari Salido Sari Bulan	Alokasi Sedang	4
9	Nagari Tambang	Alokasi Sedang	4
10	Nagari Koto Rawang	Alokasi Sedang	4
11	Nagari Balai Sinayan	Alokasi Sedang	4
12	Nagari Ampang Tareh Lumpo	Alokasi Sedang	4
13	Nagari Bukik Kaciak Lumpo	Alokasi Rendah	4
14	Nagari Sungai Sariak Lumpo	Alokasi Rendah	4

UIN IMAM BONJOL PADANG

15	Nagari Gunuang Bungkuak Lumpo	Alokasi Rendah	4
16	Nagari Ampuan Lumpo	Alokasi Rendah	4
17	Nagari Sungai Gayo Lumpo	Alokasi Rendah	4
18	Nagari Taratak Tangah Lumpo	Alokasi Rendah	4
19	Nagari Batu Kunik Lumpo	Alokasi Rendah	4
20	Nagari Limau Gadang Lumpo	Alokasi Rendah	4
TOTAL			80

Sumber : Kantor Camat IV Jurai

Tabel 3.3

Rincian Responden per Nagari

No	Jabatan/Posisi	Jumlah per Nagari	Peran dalam Pengelolaan
1	Wali Nagari	1	Penanggungjawab utama
2	Sekretaris Nagari	1	Koordinator administrasi
3	Bendahara Nagari	1	Pengelola keuangan

4	Ketua Badan Musyawarah Nagari (BAMUS)	1	Fungsi pengawasan
TOTAL PER NAGARI		4	

Dengan demikian, total sampel penelitian ini adalah 80 responden yang tersebar di 20 nagari di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang menggambarkan hasil perhitungan atau pengukuran yang dijabarkan dalam bentuk numerik data kuantitatif dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai angka.[79]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber aslinya.[80] Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner (angket) yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada indikator landasan teori dan penelitian sebelumnya. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden yaitu sebanyak 80 responden yang terdiri Wali Nagari, Sekretaris, Bendahara, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) , di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[79] Abigail Soesana, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Yayasan kita menulis, 2023).80 ibid, hal 146-147
[80] Ibid, hal 146-147

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner Wali Nagari, Sekretaris, Bendahara, Ketua BAMUS, kuesioner diberikan secara langsung kepada desa-desa yang menerima alokasi dana desa yang pengisiannya di dampingi langsung oleh penulis.

Pengembalian kuesioner diambil langsung ke nagari tersebut. Pertanyaan dalam kuesioner disusun secara terstruktur sesuai indikator tiap variabel penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari pemerintah desa sebagai responden penelitian. Instrument yang digunakan untuk mengukur skala penelitian ini menggunakan skala likert.

Tabel 3. 4

Penepatan Skala Likert

No	Jawaban	Keterangan	Skor
1	SS	Sangat Setuju	5
2	S	Setuju	4
3	N	Netral	3
4	TS	Tidak Setuju	2
5	STS	Sangat Tidak Setuju	1

UIN IMAM BONJOL PADANG

F. Varibel Penelitian

Variabel penelitian merupakan objek yang menempel pada diri subjek berupa suatu data yang dikumpulkan dan menggambarkan suatu kondisi atau nilai

masing-masing subjek penelitian.[81]Variabel penelitian didefenisikan sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[82]

Dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian merupakan suatu objek berupa data yang dikumpulkan melalui subjek penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi yang dapat ditarik kesimpulannya. dimana variabel yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Variabel bebas (independent)

Variabel independen/bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya varibel dependen(terikat).[83] Variabel independen dalam penelitian ini adalah Transparansi (X1),Akuntabilitas (X2) dan Pengendalian Internal (X3)

2. Variabel terikat (dependen)

Variabel dependen/terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel independen (bebas).[84] Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa* (Y).

UIN IMAM BONJOL PADANG

[81] Tritjahjo, Ragam Dan Prosedur Penelitian Tindakan, (Salatiga : Satya Wacana University Press, ISBN 978-602-5881-54-1, 2019), hal 31-32
[82] 59 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2016), hal 38
[83] Ibid, hal 39
[84] Ibid, hal 39

Tabel 3. 5

Defenisi Operasional Varibel

NO	Variabel	Defenisi	Indikator	Sumber	Skala
1.	**Transparansi (X1)**	Transparansi adalah keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakatberdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa .	1. Kejelasan Informasi 2. Kemudahan Akses 3. Keterlibatan Masyarakat 4. Proses Pengawasan	Sinta Suciana (2025)	Likert
2.	**Akuntabilitas (X2)**	Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja aparatur nagari kepada pihak yang berhak atau berwenang diberi pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa	1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Akuntabilitas Program 4. Akuntabilitas Kebijakan	Nurdiono (2019)	Likert
3.	**Pengendalian**	Pengendalian internal adalah	1. Lingkungan	Mimi	Likert

UIN IMAM BONJOL PADANG

	Internal (X3)	proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Aktivitas Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan	Nurhidaya nt (2025)	
4.	**Pencegahan Fraud (Y)**	Pencegahan fraud adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan aktivitas yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, mencakup penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi, dan pengawasan yang efektif	1. Analisis Resiko 2. Implementasi 3. Hukuman 4. Tinjauan	Susilowati (2024)	Likert

UIN IMAM BONJOL PADANG

G. Teknis Analis Data

1. **Uji Instrumen Penelitian**

a. Uji Validitas

Uji Validitas mengukur sejauh mana instrumen pengukuran benar-benar mengukur apa yang dimaksud.[85] Menurut Sugiyono valid berarti terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya. Metode yang digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan analisis korelasi, yaitu dengan mencari korelasi antara masing-masing item pertanyaan dari instrumen dengan skor semua item. Kriteria pengujian validitas yaitu instrumen dikatakan valid jika nilai korelasi (r hitung) > r tabel ,dengan tingkat signifikansi 0,05.[86]

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas mengacu pada tingkat konsistensi atau keandalan hasil yang diberikan oleh suatu instrumen penelitian. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil yang diperoleh dari pengukuran dapat direplikasi. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan hasil yang konsisten ketika pengukuran diulang dalam kondisi yang sama. Uji reliabilitas penting untuk memastikan bahwa alat ukur tidak terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal yang tidak terkait dengan variabel yang diukur. Reliabilitas dapat diukur dari nilai alfa Cronbach.[87]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[85] Zainuddin Iba Aditya Wardhana, Uji Validitas Dan Reliabilitas Pada Data Penelitian Kuantitatif, (CV.Eureka Media Aksara, 2024)
[86] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.
[87] Riko Al Hakim, Ika Mustika, and Wiwin Yuliani, "Validitas Dan Reliabilitas Angket Motivasi Berprestasi" Vol.4, No. 4 (2021): 263–68.

b. jika nilai dari Cronbch's Alpha lebih besar 0,70 maka angket atau kuisinoner bisa disebut reliabel

c. Jika nilai dari Cronbach's Alpha lebih kecil 0,70 kuisioner atau angket disebut tidak reliabel.

2. Analisis statistik deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.[88]

3. Analisis SEM-PLS

PLS-SEM adalah teknik dalam Structural Equation Modelling yang didasarkan pendekatan iteratif yang memaksimalkan varian yang dijelaskan dari setiap variabel endogen. PLS-SEM memiliki beberapa keunggulan dibangdingkan metode SEM berbasis covariance. PLS SEM dapat digunakan untuk menganalisis data yang tidak dapat memenuhi asumsi kenormalan data, atau data penelitian sedikit. Metode ini juga dapat digunakan untuk menganalisis variabel kontruk yang bersifat reflektif. PLS-SEM lebih efisien untuk analisis data dengan sampel kecil dibandingkan metode Covarian Based SEM (CB-SEM).[89] Tahapan analisis PLS adalah.[90]

a. Evaluasi Outer Model (Model Pengukuran)

[88] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.h. 206

[89] Jerhi Wahyu Fernanda, Vira Luthfiana, and M.Khoiril Akhyar, "Analisis Partial Least Square Structural Equation Model (PLS-SEM) Untuk Permodelan Penerimaan Sistem Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah (JIBAS)," Jurnal Ilmiah Teori Dan Aplikasi Statistika 15, no. 2 (2022): 293.

[90] Gunistiyo, Dien Noviany, and Deddy Prihadi, Metodologi Penelitian Modern: Panduan SmartPLS Yang Praktis Untuk Peneliti (Tegal, Jawa Tengah: Universitas Pancasakti Tegal, 2024).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Model Pengukuran (Outer Model) didefinisikan sebagai suatu model yang menghubungkan setiap indikator dengan variabel latennya. Tahapan yang dilakukan adalah.[91]

1) Uji Validitas konvergen (Convergent Validity)

Uji Validitas konvergen adalah uji yang digunakan untuk mengetahui validitas setiap hubungan atau korelasi antara indikator dan variabel laten. Suatu korelasi dapat dikatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai loading factor ≥ 0,70

2) Uji Average Variance Extracted (AVE)

Uji Average Variance Extracted (AVE) merupakan besar varians indikator yang dapat dimiliki oleh variabel laten dan digunakan untuk mengetahui syarat validitas diskriminan dapat tercapai. Nilai AVE dinyatakan baik atau valid apabila nilai AVE masing-masing variabel ≥ 0,50 yang mempunyai arti bahwa 50% atau lebih variance dari indikator dapat dijelaskan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

b. Evaluasi Inner Model (Model struktural)

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone Geisser Q-square test untuk predictive relevan dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur structural.[92]

1) Koefisien determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) merupakan cara untuk menilai seberapa

[91] Siti Nurhalizah, Gusmi Kholijah, and Gusmanely, "Analisis Structural Equation Modeling Partial Least Square Pada Kinerja Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi," Indonesian Journal of Applied Statistics, 6, no. 2 (2023): 30.
[92] Natalia Ririn Furadantin, "Analisis Data Menggunakan Aplikasi Smart PLS V.3.2.7 2018," 2020.

besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilai koefisien determinasi (R2) berada dalam rentang antara 0 dan 1. Nilai (R2) sebesar 0,75 dianggap menunjukkan model yang kuat, 0,50 menunjukkan model yang moderat, dan dan 0,25 menujukkan model yang lemah.

2) Cross-validated Redundancy (Q2)

Cross-validated redundancy (Q2) atau Q-square test digunakan untuk menilai predictive relevance. Nilai Q2 > 0 menunjukkan bahwa model mempunyai predictive relevance yang akurat terhadap konstruk tertentu, sedangkan nilai Q2 < 0 menunjukkan bahwa model kurang mempunyai predictive relevance.

4. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis atau uji statistik merupakan pengujian terhadap pernyataan yang kebenarannya masih diragukan (belum pasti).[93] Dan untuk mengetahui membuktikan sejauh mana varibel independent dapat berpengaruh terhadap varibel dependen. Dasar pengambilan Keputusan dari uji persial yaitu: [94]

a. apabila angka signifikan > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya bahwa variabel indenpenden tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
b. apabila angka signifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.Artinya variabel independen mempunyai pengaruh

[93] Hasny Delaila Siregar et al., "Analisis Uji Hipotesis Penelitian Perbandingan Menggunakan Statistik Parametrika," Al Itihadu Jurnal Pendidikan. Vol. 1, No. 1 (2022): h. 5
[94] Sugiyono. Op. Cit h. 208

UIN IMAM BONJOL PADANG

signifikan terhadap variabel dependen.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Responden

Penelitian ini mengambil sampel pada kantor wali nagari yang terdapat di kecamatan IV jurai sebanyak 4 observasi pernagari yaitu 80 sampel. Penelitian ini dilaksanakan dengan menyebar kuisioner langsung pada perangkat nagari Responden dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan desa/nagari, jenis kelamin, usia, jabatan, dan pendidikan terakhir dan penelitian dilakukan pada tahun 2026. Berikut penjelasan mengenai data responden:

B. Karekteristik Responden

1. Karakteristik Berdasarkan Desa/Nagari

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Desa/Nagari

No	Nama Nagari	Responden	Persentase
1.	Nagari Painan	4	5%
2.	Nagari Painan Selatan	4	5%
3.	Nagari Painan Timur	4	5%
4	Nagari Salido	4	5%
5.	Nagari Tambang	4	5%
6.	Nagari Lumpo	4	5%
7.	Nagari Bukik Kaciak Lumpo	4	5%
8.	Nagari Sungai Sariak Lumpo	4	5%
9.	Nagari Gunung Bungkuak Lumpo	4	5%

UIN IMAM BONJOL PADANG

10.	Nagari Ampang Tareh Lumpo	4	5%
11.	Nagari Ampuan Lumpo	4	5%
12.	Nagari Balai Sinayan	4	5%
13.	Nagari Bungo Pasang Salido	4	5%
14.	Nagari Salido Sari Bulan	4	5%
15	Nagari Sago Salido	4	5%
16.	Nagari Koto Rawang	4	5%
17.	Nagari Taratak Tangah Lumpo	4	5%
18	Nagari Batu Kunik Lumpo	4	5%
19	Nagari Limau Gadang Lumpo	4	5%
20.	Nagari Sungai Gayo Lumpo	4	5%
Total		80	100%

Sumber: Data Primer yang diolah (2026)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 80 responden yang digolongkan berdasarkan asal Desa/Nagari, responden tersebar merata pada 20 nagari di wilayah penelitian, yaitu Nagari Painan, Nagari Painan Selatan, Nagari Painan Timur, Nagari Salido, Nagari Tambang, Nagari Lumpo, Nagari Bukik Kaciak Lumpo, Nagari Sungai Sariak Lumpo, Nagari Gunung Bungkuak Lumpo, Nagari Ampang Tareh Lumpo, Nagari Ampuan Lumpo, Nagari Balai Sinayan, Nagari Bungo Pasang Salido, Nagari Salido Sari Bulan, Nagari Sago Salido, Nagari Koto Rawang, Nagari Taratak Tangah Lumpo, Nagari Batu Kunik Lumpo, Nagari Limau Gadang Lumpo, dan Nagari Sungai Gayo Lumpo, dengan masing-masing nagari berjumlah 4 orang responden atau setara dengan persentase 5% dari total keseluruhan

UIN IMAM BONJOL PADANG

responden. Jadi, dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini terdistribusi secara merata di seluruh 20 nagari yang menjadi lokasi penelitian, dengan jumlah dan persentase responden yang sama pada setiap nagari

2. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Responden	Persentase
1.	Laki-laki	44	55%
2.	Perempuan	36	45%
Total		80	100%

Sumber: Data Primer yang diolah (2026

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa dari 80 responden yang digolongkan berdasarkan jenis kelamin, terdapat responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 44 orang dengan persentase 55% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 36 orang dengan persentase 45%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak pada penelitian ini terdapat pada responden berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 44 orang dan responden paling sedikit yaitu responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 36 orang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3. Karakteristik Berdasarkan Jabatan Pemerintah Nagari

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Pemerintah Nagari

No	Jenis Jabatan	Responden	Persentase
1.	Wali Nagari	20	25%

2.	Sekretaris Nagari	20	25%
3.	Bendahara Nagari	20	25%
4.	Ketua Bamus Nagari	20	25%
Total		80	100%

Sumber: Data Primer yang diolah (2026)

Dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa dari 80 responden yang digolongkan berdasarkan jabatan pemerintah Nagari, terdapat responden dengan jabatan Wali Nagari sebanyak 20 orang dengan persentase 25%, responden dengan jabatan Sekretaris Nagari sebanyak 20 orang dengan persentase 25%, responden dengan jabatan Bendahara Nagari sebanyak 20 orang dengan persentase 25%, dan responden dengan jabatan Ketua Bamus Nagari sebanyak 20 orang dengan persentase 25%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini terdistribusi secara merata pada keempat jabatan pemerintah Nagari tersebut, dengan jumlah dan persentase responden yang sama pada masing-masing jabatan.

4. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Responden	Persentase
1.	S1	27	34%
2.	D3	4	5%
3.	SMA/Sederajat	49	61%
Total		80	100%

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sumber: Data Primer yang diolah (2026

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa dari 80 responden yang digolongkan berdasarkan pendidikan terakhir, terdapat responden dengan pendidikan S1 sebanyak 27 orang dengan persentase 34%, responden dengan pendidikan D3 sebanyak 4 orang dengan persentase 5%, dan responden dengan pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 49 orang dengan persentase 61%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak pada penelitian ini terdapat pada responden dengan pendidikan terakhir SMA/Sederajat yaitu sebanyak 49 orang, dan yang paling sedikit yaitu responden dengan pendidikan terakhir D3 yaitu sebanyak 4 orang.

C. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis dasar yang digunkan untuk meggambarkan keadaan data secara umum seperti menjelaskan, meringkas, mereduksi, menyederhanakan, mengorganisasi dan menyajikan data kedalam bentuk tersusun dan teratur sehingga mudah dibaca dan difahami dan disimpulkanAnalisis deskriptif adalah analisis dasar yang digunkan untuk meggambarkan keadaan data secara umum seperti menjelaskan, meringkas, mereduksi, menyederhanakan, mengorganisasi dan menyajikan data kedalam bentuk tersusun dan teratur sehingga mudah dibaca dan difahami dan disimpulkan

Menurut Sugiyono, tingkat pencapaian responden yang diperoleh dan jalan menghitung menggunakan rumus

$$TCR = \frac{skor\ hasil\ penelitian}{skor\ ideal} x\ 100$$

Keterangan :

UIN IMAM BONJOL PADANG

TCR : Tingkat capaian responden

Skor hasil penelitian : Skor dari nilai total yang didapatkan dari setiap responden atas jawabanya

Skor ideal : Skor yang digunakan dalam pemahaman setiap responden di semua pernyataan memberikan jawaban dengan skor tertinggi

Untuk mengetahui TCR berdasarkan sifat tertentu, diperlukan Gambaran yang jelas tentang Tingkat capaian tersebut. Oleh karena itu peneliti membutuhkan skala pengukuran dengan lima tingkatan yang disesuaikan dengan sifat tertentu, yang disajikan pada tabel 4.5 berikut

Tabel 4.5 Tingkat Pencapaian Responden

Tingkat Pencapaian Responden Kriteria	Kriteria
85%-100%	Sangat baik
66%-84%	Baik
51%-65%	Cukup
36%-50%	Kurang baik
0%-35%	Tidak baik

1. Variabel Transparansi

Hasil data responden terkait variabel Transparansi dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 4.6 TCR Variabel Transparansi

Indikator	Jawaban Responden					N	Skor Ideal	Skor Hasil	TCR
	STS	TS	N	S	SS				
X1.2	0	0	0	13	67	80	400	387	96,75%
X1.3	0	0	1	10	69	80	400	388	97,00%
X1.4	0	13	28	20	19	80	400	285	71,25%
X1.5	0	0	22	34	24	80	400	322	80,50%
X1.6	0	3	15	39	23	80	400	322	80,50%
X1.7	0	0	6	33	41	80	400	355	88,75%

Sumber : diolah di Exel, 2026

Dari tabel 4.6 di atas, indikator dengan tingkat capaian responden tertinggi terdapat pada indikator X1.3 dengan nilai TCR sebesar 97,00%, sedangkan indikator dengan tingkat capaian terendah terdapat pada indikator X1.4 dengan nilai TCR sebesar 71,25%. Secara keseluruhan, rata-rata TCR variabel Transparansi (X1) adalah sebesar 85,79%, yang menunjukkan bahwa variabel Transparansi (X1) berada pada kriteria sangat baik.

2. Variabel Akuntabilitas

Hasil data responden terkait variabel akuntabilitas dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel 4.7 TCR Variabel Akuntabilitas

Indikator	Jawaban Responden					N	Skor Ideal	Skor Hasil	TCR
	STS	TS	R	S	SS				
X2.1	0	6	10	26	38	80	400	336	84,00%
X2.2	0	8	17	35	20	80	400	307	76,75%
X2.3	0	11	19	31	19	80	400	298	74,50%
X2.4	0	13	27	19	21	80	400	288	72,00%
X2.5	0	0	18	35	27	80	400	329	82,25%
X2.6	0	0	13	26	41	80	400	348	87,00%

Sumber : diolah di Exel, 2026

Dari tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa keenam indikator pada variabel akuntabilitas (X2) berada pada kategori Baik hingga Sangat baik. Indikator dengan tingkat capaian responden tertinggi terdapat pada indikator X2.6 dengan nilai TCR sebesar 87,00% (kategori Sangat baik), sedangkan indikator dengan tingkat capaian responden terendah terdapat pada indikator X2.4 dengan nilai TCR sebesar 72,00% (kategori Baik). Secara keseluruhan, rata-rata TCR variabel akuntabilitas (X2) adalah sebesar 79,42%, yang berada pada kategori Baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X2) memiliki tingkat capaian responden yang baik.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3. Variabel Pengendalian Internal

Hasil data responden terkait variabel Pengendalian Internal dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut

Tabel 4.8 TCR Variabel Pengendalian Internal

Indikator	Jawaban Responden					N	Skor Ideal	Skor Hasil	TCR
	STS	TS	R	S	SS				
X3.4	0	6	21	44	9	80	400	296	74,00%
X3.5	0	6	22	46	6	80	400	292	73,00%
X3.6	0	0	3	50	27	80	400	344	86,00%
X3.7	0	13	17	36	14	80	400	291	72,75%
X3.9	0	16	25	28	11	80	400	274	68,50%
X3.10	0	6	15	39	20	80	400	313	78,25%
X3.11	0	8	17	38	17	80	400	304	76,00%
X3.12	0	1	7	46	26	80	400	337	84,25%
X3.13	0	5	25	41	9	80	400	294	73,50%

Sumber : diolah di Exel, 2026

Dari tabel 4.8 di atas, indikator dengan tingkat capaian responden tertinggi terdapat pada indikator X3.6 dengan nilai TCR sebesar 86,00%, sedangkan indikator dengan tingkat capaian terendah terdapat pada indikator X3.9 dengan nilai TCR sebesar 68,50%. Secara keseluruhan, rata-rata TCR variabel Pencegahan Fraud (X3) adalah sebesar 76,25%, yang menunjukkan bahwa variabel Pencegahan Fraud (X3) berada pada kriteria baik.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4. Pencegahan Fraud

Hasil data responden terkait variabel Pencegahan Fraud dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut

Tabel 4.9 TCR Variabel Pencegahan Fraud

Indikator	Jawaban Responden					N	Skor Ideal	Skor Hasil	TCR
	STS	TS	R	S	SS				
Y1	0	0	12	51	17	80	400	325	81,25%
Y2	0	0	16	51	13	80	400	317	79,25%
Y3	0	5	9	55	11	80	400	312	78,00%
Y4	0	0	0	13	67	80	400	387	96,75%

Y5	0	0	0	36	44	80	400	364	91,00%
Y6	0	0	0	46	34	80	400	354	88,50%

Sumber : diolah di Exel, 2026

Dari tabel 4.9 di atas, indikator dengan tingkat capaian responden tertinggi terdapat pada indikator Y4 dengan nilai TCR sebesar 96,75%, sedangkan indikator dengan tingkat capaian terendah terdapat pada indikator Y3 dengan nilai TCR sebesar 78,00%. Secara keseluruhan, rata-rata TCR variabel Pengendalian Internal (Y) adalah sebesar 85,79%, yang menunjukkan bahwa variabel Pengendalian Internal (Y) berada pada kriteria sangat baik.

D. Analisis Data

1. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian ini menggunakan 30 responden dengan objek yang berbeda yaitu perangkat nagari di kecamatan Bayang.

a. Uji Validitas

Uji Validitas yang dipakai untuk menunjukkan variabel yang perlu diukur. Data kuisioner yang tidak valid berarti tidak dapat mengukur apa yang diukur sehingga hasil yang didapatkan tidak bisa diandalkan dan tidak valid harus dibuang atau diperbaiki. Indikator dikatakan valid apabila memiliki nilai loading faktor minimal 0,7[95] dan jika dibawah 0,7 berarti item penyataan tidak bisa digunakan.

[95] Joseph F. Hair et al., Multivariate Data Analysis, ed. ke-8 (Upper Saddle River, NJ: Cengage Learning, 2019), hlm. 725..

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 4.10

Other Loading

Variabel	Indikator	Outher loading	Keterangan
Transparansi (X1)	X1.1	0,320	Tidak Valid
	X1.2	0,795	Valid
	X1.3	0,763	Valid
	X1.4	0,757	Valid
	X1.5	0,816	Valid
	X1.6	0,863	Valid
	X1.7	0,767	Valid
	X1.8	0,028	Tidak Valid
Akuntabilitas (X2)	X2.1	0,816	Valid
	X2.2	0,922	Valid
	X2.3	0,885	Valid
	X2.4	0,753	Valid
	X2.5	0,796	Valid
	X2.1	0,761	Valid
Pengendalian Internal (X3)	X3.1	0,242	Tidak Valid
	X3.2	0,175	Tidak Valid
	X3.3	0,228	Tidak Valid
	X3.4	0,813	Valid
	X3.5	0,767	Valid

UIN IMAM BONJOL PADANG

	X3.6	0,936	Valid
	X3.7	0.822	Valid
	X3.8	-0,120	Tidak Valid
	X3.9	0.868	Valid
	X3.10	0,768	Valid
	X3.11	0,849	Valid
	X3.12	0,920	Valid
	X3.13	0,884	Valid
Pencegahan Fraud (Y)	Y1	0,872	Valid
	Y2	0,841	Valid
	Y3	0,764	Valid
	Y4	0,855	Valid
	Y5	0,905	Valid
	Y6	0,843	Valid

Sumber: pengolahan data dengan Smart PLS 4

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan data tidak valid pada bagian X1.1,X1.8, X3.1, X3.2, X3.3 dan X3.8 jadi data kuisioner yang tidak valid, tidak digunakan untuk mengukur apa yang diukur, karena nilai loading faktor dibawah 0,7 sehingga peneliti tidak menggunakan data yang tidak valid tersebut. Setelah menghapus atau mennghilangkan data tersebut, peneliti Kembali melakukan pengukuran pada tabel 4.11 yang menunjukkan bahwa:

Tabel 4.11

Other Loading

Variabel	Indikator	Outher loading	Keterangan
Transparansi (X1)	X1.1	0,795	Valid
	X1.2	0,763	Valid
	X1.3	0,757	Valid
	X1.4	0,816	Valid
	X1.5	0,863	Valid
	X1.6	0,767	Valid
Akuntabilitas (X2)	X2.1	0,816	Valid
	X2.2	0,922	Valid
	X2.3	0,885	Valid
	X2.4	0,753	Valid
	X2.5	0,796	Valid
	X2.6	0,761	Valid
Pengendalian Internal (X3)	X3.1	0,813	Valid
	X3.2	0,767	Valid
	X3.3	0,936	Valid
	X3.4	0,822	Valid
	X3.5	0,868	Valid
	X3.6	0,768	Valid
	X3.7	0,849	Valid

UIN IMAM BONJOL PADANG

	X3.8	0,920	Valid
	X3.9	0,884	Valid
Pencegahan Fraud (Y)	Y1	0,872	Valid
	Y2	0,841	Valid
	Y3	0,764	Valid
	Y4	0,855	Valid
	Y5	0,905	Valid
	Y6	0,843	Valid

Sumber: pengolahan data dengan Smart PLS 4

Dari tabel 4.11 diatas dapat dilihata bahwa setiap indikator nilai > 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap indikator tersebut valid.

b. Uji Validitas

Tabel dibawah menunjukkan nilai composite reliability telah memenuhi syarat > 0,7 ini dapat dikatakan menunjukkan pengukuran yang reliabel/handal. Dan penelitian ini bisa dilanjutkan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 4. 12

Nilai Composite Reliability Uji Coba

Variabel	Kriteria	Composite Reliability	Keterangan
Transparansi	>0,70	0.963	Reliabel
Akuntabilitas		0.931	Reliabel

Pengendalian Internal		0.962	Reliabel
Pencegahan Fraud		0.942	Reliabel

Sumber : Data uji coba validitas dan reliabilitas

Berdasarkan tabel 4.12, dapat dilihat nilai *composite reliability* dari setiap variabel memperoleh nilai *composite reliability* > 0,70 maka hasil ini menunjukan bahwa setiap variabel penelitian tersebut telah memenuhi persyaratan nilai *composite reliability*, sehingga menunjukkan pengukuranya yang reliabel/handal, dan penelitian ini bisa untuk dilanjutkan.

2. Analisis SEM PLS

a. Outher Model (Model Pengukuran)

Evaluasi outher model adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat pengumpul data (*measurement*). Berikut gambar 4.1 terkait model structural outer model.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 4. 1

Gambar Structural Outer Model

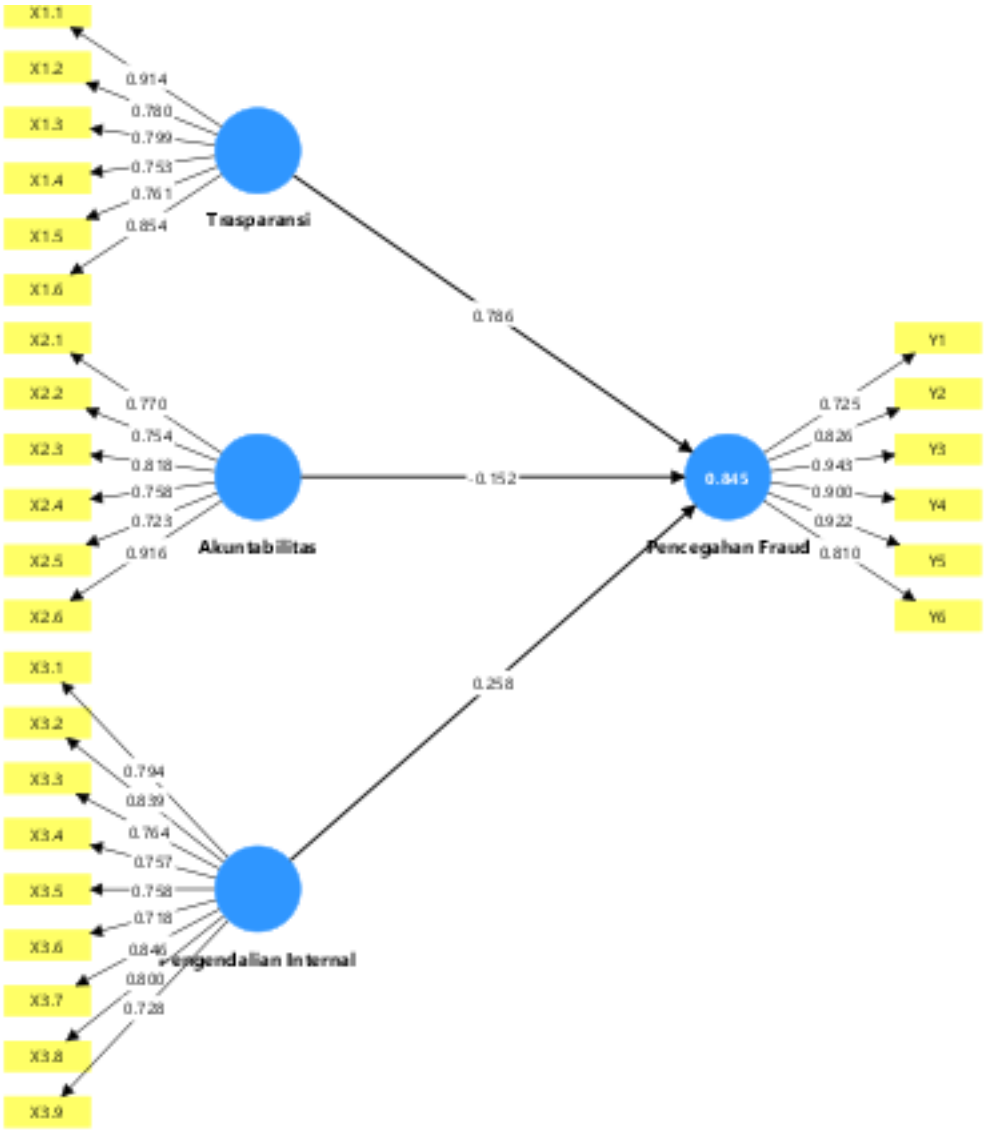

1) Uji Validitas

Uji validitas ini mengacu sejauh mana instrumen penelitian benar- benar mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner. Untuk uji validitas dapat di uji sebagai berikut:

a) *Convergent Validit*

Validitas konvergen mengacu pada model yang dievaluasi menggunakan indikator refleksif berdasarkan korelasi antara skor subjek/komponen dan skor konstruk yang dihitung PLS. Suatu indikator dikatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai outer loading >0.70.[96] Semakin tinggi nilai outer loading suatu indikator, maka semakin besar pula kontribusi indikator tersebut dalam merepresentasikan variabel latennya (konstruk). Indikator yang memiliki nilai outer loading <0.70 dinyatakan tidak valid dan sebaiknya dikeluarkan dari model penelitian. Validitas konvergen Uji dihasilkan dari indikator masing-masing. Dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4. 13

Hasil Uji Convergent Validity

Variabel	Indikator	Outher loading	Keterangan
Transparansi (X1)	X1.1	0,914	Valid
	X1.2	0,780	Valid
	X1.3	0,799	Valid
	X1.4	0,753	Valid
	X1.5	0,761	Valid
	X1.6	0,854	Valid
	X2.1	0,770	Valid

[96] Joseph F. Hair et al., Multivariate Data Analysis, ed. ke-8 (Upper Saddle River, NJ: Cengage Learning, 2019), hlm. 725..

UIN IMAM BONJOL PADANG

Akuntabilitas (X2)	X2.2	0,754	Valid
	X2.3	0,818	Valid
	X2.4	0,758	Valid
	X2.5	0,723	Valid
	X2.6	0,916	Valid
Pengendalian Internal (X3)	X3.1	0,794	Valid
	X3.2	0,839	Valid
	X3.3	0,764	Valid
	X3.4	0,757	Valid
	X3.5	0,758	Valid
	X3.6	0,718	Valid
	X3.7	0,846	Valid
	X3.8	0,800	Valid
	X3.9	0,728	Valid
Pencegahan Fraud (Y)	Y1	0,725	Valid
	Y2	0,826	Valid
	Y3	0,943	Valid
	Y4	0,900	Valid
	Y5	0,922	Valid
	Y6	0,810	Valid

Sumber : Data diolah mengggunakan PLS 4.0

Diketahui bahwa setiap indikator variabel penelitian memiliki nilai outher loading >0.70. sehingga dapat disimpulkan untuk setiap variabel

UIN IMAM BONJOL PADANG

dinyatakan valid.

b) *Average variance extracted (AVE)*

Selain mengamati nilai cross loading, discriminant validity juga dapat diketahui melalui metode lainya yaitu dengan melihat nilai *average extracted* (AVE), dengan syarat untuk masing-masing indikator nilainya > 0,5[97] untuk model yang baik. Nilai *average variance extracted* (AVE) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4. 14 sebagai berikut:

Tabel 4. 14

Nilai Avarage Variance Extracted

Variabel	Kriteria	AVE	Keterangan
Transparansi	>0,5	0.660	Reliabel
Akuntabilitas		0.628	Reliabel
Pengendalian Internal		0.608	Reliabel
Pencegahan Fraud		0.736	Reliabel

2) Uji Reabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi hasil suatu penelitian ketika dilakukan secara berulang-ulang semakin tinggi reliabilitasnya, maka penelitian tersebut dapat digunakan.

[97] Joseph F. Hair et al., Multivariate Data Analysis, ed. ke-8 (Upper Saddle River, NJ: Cengage Learning, 2019), hlm. 725..

UIN IMAM BONJOL PADANG

a) *Composite reliability*

Composite reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk lebih baik dalam mengistimasi konsistensi internal suatu konstruk. Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi *composite reability* apabila memiliki nilai > 0,70.[98] Berikut ini adalah nilai composite realibility dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terdapat pada tabel 4.15 Sebagai berikut.

Tabel 4. 15

Nilai Composite reliability

Variabel	Kriteria	Composite reliability	Keterangan
Transparansi	>0,70	0.921	Reliabel
Akuntabilitas		0.910	Reliabel
Pengendalian Internal		0.933	Reliabel
Pencegahan Fraud		0.943	Reliabel

Sumber: Data diolah menggunakan PLS 4.0

Berdasarkan tabel 4.15 Diketahui bahwa nilai *composite reliability* disetiap variabel dalam penelitian lebih besar dari >0,70, sehingga kriteria uji *composite reliability* sudah terpenuhi dan dinyatakan

[98] Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2019). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (2nd ed.). Sage Publications

UIN IMAM BONJOL PADANG

reliabel

b) *Crombach Alpha*

Dalam PLS, uji reabilitas diperkuat dengan adanya *Crombach alpha* dimana konsistensi setiap jawaban diujikan. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika nilai *crombach alpha* > 0,70.[99] Berikut ini merupakan nilai *crombach alpha* dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 4.16 Sebagai berikut.

Tabel 4. 16

Nilai Crombach alpha

Variabel	Kriteria	Crombach alpha	Keterangan
Transparansi	>0,70	0.896	Reliabel
Akuntabilitas		0.880	Reliabel
Pengendalian Internal		0.921	Reliabel
Pencegahan Fraud		0.926	Reliabel

Sumber: Data diolah menggunakan PLS 4.0

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat nilai *crombach alpha* dari variabel penelitian Transparansi, Akuntabilitas , Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud memiliki nilai >0,70 dengan demikian hasil

[99] Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2019). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (2nd ed.). Sage Publications.

UIN IMAM BONJOL PADANG

ini menunjukkan bahwa variabel penelitian tersebut telah memenuhi persyaratan nilai *crombach* yang membuktikan pengukuran dalam penelitian adalah reliabel/hadal.

b. Uji model struktural atau inner model

I*nner model* adalah model struktural, berdasarkan nilai koefisien jalur, melihat seberapa besar pengaruh antar variabel laten dengan perhitungan bootstapping. Beberapa uji untuk model struktur yaitu:

1) Uji R-Square (R^2)

Untuk uji R-square ini merupakan teknik yang memperkirakan berapa banyak untuk suatu konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilai koefisien determinasi (R^2) diperkirakan antara 0 dan 1, kriteria nilai R^2>0,75 (Model kuat), R^2 > 0,50 (Model sedang), R^2 > 0,25 (Model lemah).[100] Setelah melakukan pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS 4.0 hasil R *Square* dapat dilihat pada tabel 4.17 Sebagai berikut:

Tabel 4. 17

Nilai R-Square

Variabel	R-Square	Keterangan
Pencegahan Fraud	0,845	Model Kuat

Sumber: Data diolah menggunkan PLS 4.0

Berdasarkan tabel 4.17 Dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengujian nilai R-*Square* pada variabel kualitas audit adalah 0,845 > 0.75, maka model

[100] Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2017). Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Dalam C. Homburg, M. Klarmann, & A. Vomberg (Eds.), Handbook of Market Research. Springer.

ini dinyatakan sedang artinya bahwa kemampuan variabel Transparansi Akuntabilitas, dan pengendalian internal dapat mejelaskan variabel Pencegahan Fraud 84,5% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain.

2) Q-*Square* atau *cross validated redundancy* (Q^2)

Selain mempertimbangkan ukuran R-Square, penilaian model PLS juga dapat menggabungkan ukuran akurasi prediksi penggunaan model kembali sampel prediktif. Dimana kriteria penilaian Q-*Square*, jika $Q^2 > 0$ menunjukkan model memiliki nilai prediksi yang tepat untuk konstruk tertentu sedangkan nilai $Q^2 < 0$ berarti model tersebut tidak memiliki nilai prediksi yang akurat. kriteria nilai $Q^2 > 0{,}35$ (Model kuat), $Q^2 < 0{,}35$ (Model sedang), $Q^2 < 0{,}15$ (Model lemah).[101] Setelah melakukan pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS 4.0

. Hasil pengolahan data untuk Q-square dengan memakai SmartPLS 4 dapat dilihat pada tabel 4.18 Sebagai berikut:

Tabel 4. 18

Nilai Q-Square

Variabel	Q-Square	Keterangan
Pencegahan Fraud	0,833	Model kuat

Sumber: Data diolah menggunkan PLS 4.0

Berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat dilihat $Q^2 > 0$ dengan nilai 0,833 > 0,35 berarti mendapatkan nilai yang besar dan dapat dinyatan kuat.

c. Analisis Uji Hipotesis *(Bootstrapping)*

Uji hipotesis untuk menilai signifikan pengaruh antar variabel, dilakukan

[101] Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. Dalam G. A. Marcoulides (Ed.), Modern Methods for Business Research (hlm. 295–336). Lawrence Erlbaum Associates.

dengan melakukan uji *bootstrapping. Bootstrapping* berguna untuk mengatasi keterbatasan sampel, mengurangi kesalahan sampel dan meningkatkan akurasi hasil penelitian. Prosedur *bootstrapping* menggunakan seluruh sampel asli untuk melakukan resampling kembali. Hasil *bootstrapping* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.19 sebagai berikut:

Tabel 4. 19

Hasil Hipotesis

Variabel	**Original sample (O)**	**Sample mean (M)**	**Standard deviation (STDEV)**	**T statistics (|O/STDEV|) *>1,66***	**P values < 0,05**	**Kesimpulan**
X1 → Y	0,786	0,798	0,079	10.010	0,000	**Diterima**
X2 → Y	-0,152	-0,144	0,060	2,539	0,011	**Diterima**
X3 → Y	0,258	0,245	0,103	2,509	0,012	**Diterima**

Sumber: Data diolah menggunkan PLS 4.0

Koefisisen jalur (*path coefficien*) dalam tabel 4.19 Dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai koefisien jalur yang positif (dilihat pada *original sample*). Kesimpulan uji hipotesis pada tabel 4.19 adalah sebagai berikut:

1) Pengaruh Transparansi (X1) terhadap Pencegahan Fraud (Y): berdasarkan hasil uji hipotesis dalam tabel 4.19 diatas, dilihat dari nilai *original sample* (koefisien jalur) untuk variabel transparansi terhadap pencegahan fraud sebesar 0,786, maka arah pengaruh transparansi terhadap pencegahan fraud adalah positif. Selanjutnya, untuk menguji signifikansi pengaruh

UIN IMAM BONJOL PADANG

tersebut, dapat dilihat bahwa nilai t*statistik* variabel transparansi terhadap pencegahan fraud adalah t*statistik* 10,010 > 1,66 dan P*value* 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.

2) Pengaruh Akuntabilitas (X2) terhadap Pencegahan Fraud (Y): berdasarkan hasil uji hipotesis dalam tabel 4.19 diatas, dilihat dari nilai *original sample* (koefisien jalur) untuk variabel akuntabilitas terhadap pencegahan fraud sebesar -0,152, maka arah pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan fraud adalah negatif. Selanjutnya, untuk menguji signifikansi pengaruh tersebut, dapat dilihat bahwa nilai t*statistik* variabel akuntabilitas terhadap pencegahan fraud adalah t*statistik* 2,539 > 1,66 dan P*value* 0,011 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.

3) Pengaruh Pengendalian Internal (X3) terhadap Pencegahan Fraud (Y): berdasarkan hasil uji hipotesis dalam tabel 4.19 diatas, dilihat dari nilai *original sample* (koefisien jalur) untuk variabel pengendalian internal terhadap pencegahan fraud sebesar 0,258, maka arah pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud adalah positif. Selanjutnya, untuk menguji signifikansi pengaruh tersebut, dapat dilihat bahwa nilai t*statistik* variabel pengendalian internal terhadap pencegahan fraud adalah t*statistik* 2,509 > 1,66 dan P*value* 0,012 < 0,05 maka H_0

UIN IMAM BONJOL PADANG

ditolak dan H_3 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka hipotesis pada penelitian ini dapat dijawab sebagai berikut:

1. Pengaruh Transparansi (X1) terhadap Pencegahan Fraud (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1), diperoleh nilai t*statistik* sebesar 10,010 (>1,66) dan P*value* sebesar 0,000 (<0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, dengan nilai *original sample* sebesar 0,786 yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan, semakin besar pula efektivitas pencegahan fraud yang dapat dicapai.

Transparansi merupakan keterbukaan dalam menyediakan informasi yang jelas, benar, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik terkait proses pengambilan keputusan maupun pengelolaan keuangan. Dengan adanya transparansi, ruang gerak bagi individu untuk melakukan manipulasi atau kecurangan menjadi semakin sempit, karena setiap tindakan dan keputusan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Secara teoretis, temuan ini dapat dijelaskan melalui *Teori Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik), yang menempatkan transparansi sebagai salah satu prinsip utama

UIN IMAM BONJOL PADANG

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, di samping akuntabilitas, partisipasi, kepastian hukum, efektivitas dan efisiensi, serta daya tanggap (*responsiveness*). Prinsip transparansi dalam teori ini menuntut keterbukaan informasi mengenai proses pengambilan keputusan maupun pengelolaan keuangan kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga setiap tindakan penyelenggara pemerintahan dapat diakses, dipantau, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan terselenggaranya prinsip transparansi tersebut, ruang gerak aparatur untuk melakukan penyimpangan menjadi semakin sempit, sebab keterbukaan informasi keuangan menutup celah yang biasanya dimanfaatkan pelaku untuk melakukan manipulasi tanpa terdeteksi. Dengan kata lain, semakin terbuka proses pengelolaan keuangan terhadap pengawasan pihak luar sebagaimana diamanatkan prinsip good governance, semakin kecil ruang bagi individu untuk menyalahgunakan wewenang maupun merealisasikan niat kecurangan.[102]

Temuan ini juga sejalan dengan fakta lapangan yang ditemukan peneliti pada objek penelitian. Sebagian besar kantor Wali Nagari di Kecamatan IV Jurai telah menyediakan informasi pengelolaan keuangan desa yang relatif mudah diakses oleh masyarakat, misalnya melalui papan informasi nagari maupun forum musyawarah nagari yang rutin diselenggarakan. Namun demikian, keterlibatan aktif masyarakat dalam memanfaatkan informasi tersebut untuk mengawasi dan menindaklanjuti penggunaan anggaran masih tergolong rendah, sebab sebagian besar warga cenderung hanya menerima informasi yang disampaikan tanpa turut

[102] United Nations Development Programme (UNDP), Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document, New York: UNDP, 1997, hlm. 2–3.

serta mempertanyakan atau mengevaluasinya lebih lanjut. Kondisi lapangan ini memperkuat argumen bahwa transparansi yang efektif dalam mencegah fraud tidak hanya bergantung pada ketersediaan informasi semata, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat benar-benar dilibatkan dan mampu memanfaatkan informasi tersebut sebagai instrumen pengawasan sosial.

Hal ini sejalan dengan penelitian Setya dan Andajani yang menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama tata kelola dana desa yang baik, di mana keterbukaan informasi terkait kebijakan dan pengelolaan keuangan tetap menjadi prasyarat penting agar ruang gerak penyimpangan dapat ditekan, meskipun besarnya pengaruh transparansi dapat bervariasi tergantung konteks penerapannya di lapangan.[103] Hasil ini juga didukung oleh temuan Julita dan Abudullah yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana, karena laporan yang disusun dan dipublikasikan secara rutin dapat mengurangi risiko manipulasi data.[104] Hasil ini juga didukung oleh penelitian Wildati, Rio dan Usman kuantitatif berbasis kuesioner yang menggunakan analisis regresi linear berganda, yang membuktikan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan pada laporan keuangan desa.[105]

Namun demikian, tidak seluruh penelitian menunjukkan hasil yang sejalan

[103] Firda Setya Anggeli dan Andajani, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa", Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 13, No. 1, Januari 2024, hlm. 1–15.
[104] Eva Julita dan Syukriy Abdullah, "Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 213–221.
[105] Wildayanti SD, Rio Monoarfa, dan Usman Usman, "Pengaruh Pengendalian Internal dan Transparansi terhadap Pencegahan Kecurangan pada Laporan Keuangan", Jurnal Mirai Management, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 115–122.

UIN IMAM BONJOL PADANG

dengan temuan ini, sehingga perlu dicermati bahwa efektivitas transparansi dalam mencegah kecurangan sangat bergantung pada bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan pada masing-masing objek penelitian. Risma, Raza, Murhaban, dan Ikhyanuddin menemukan bahwa transparansi sebagai variabel intervening tidak berpengaruh terhadap pengendalian internal maupun pencegahan fraud pada SKPD Kabupaten Bireuen, yang mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi semata belum tentu efektif menekan peluang kecurangan apabila tidak didukung oleh mekanisme pengendalian yang memadai serta pengawasan berkelanjutan dari pihak eksternal.[106] Hal serupa juga ditemukan oleh Rama Yanti, Wiralestari, dan Tiswiyanti yang membuktikan bahwa transparansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sementara akuntabilitas dan partisipasi masyarakat justru berpengaruh signifikan kondisi ini diduga terjadi karena keterbukaan informasi yang disediakan pemerintah desa belum sepenuhnya diakses dan dipahami oleh masyarakat, sehingga fungsi pengawasan sosial yang semestinya lahir dari transparansi tidak berjalan optimal.[107] Demikian pula penelitian Putri dan Maryono yang tidak menemukan bukti bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, mengingat penyediaan informasi keuangan pada objek penelitian tersebut masih bersifat formalitas administratif dan belum diikuti dengan mekanisme evaluasi yang mendorong akuntabilitas publik secara nyata.[108]

[106] Mauliza Risma, Hendra Raza, Murhaban, dan Ikhyanuddin, "Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dengan Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bireuen)", Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), Vol. 3, No. 2, Juli 2024, hlm. 218–241.
[107] Elisa Rama Yanti, Wiralestari, dan Wiwik Tiswiyanti, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh)", Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu), Vol. 12, No. 01, 2023, hlm. 53–64.
[108] A. R. L. Putri dan Maryono, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa", Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4, Special Issue 3, 2022, hlm. 1668–1688.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Perbedaan hasil ini menegaskan bahwa transparansi bukan merupakan faktor tunggal yang secara otomatis mampu mencegah fraud, melainkan sangat bergantung pada kualitas penyampaian informasi, tingkat literasi dan keterlibatan masyarakat dalam mengakses serta menindaklanjuti informasi tersebut, dan konsistensi penerapannya pada setiap tahapan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, hasil mengenai pengaruh transparansi terhadap upaya antifraud masih menunjukkan ketidakkonsistenan antarkonteks penelitian, dan perlu dipandang sebagai faktor yang bersifat kontekstual, bukan variabel yang berdiri sendiri secara universal.

Dengan demikian, semakin terbuka proses pengelolaan keuangan terhadap pengawasan pihak luar, semakin kecil ruang bagi individu untuk merasionalisasi maupun merealisasikan niat kecurangan.

2. **Pengaruh Akuntabilitas (X2) terhadap Pencegahan Fraud (Y)**

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan nilai t*statistik* sebesar 2,539 (>1,66) dan P*value* sebesar 0,011 (<0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima. Namun, nilai *original sample* menunjukkan arah koefisien negatif sebesar -0,152, yang berarti akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Artinya, semakin tinggi skor akuntabilitas yang dipersepsikan oleh responden pada penelitian ini, justru berasosiasi dengan menurunnya efektivitas pencegahan fraud.

Kondisi ini turut didukung oleh fakta lapangan yang ditemukan peneliti. Di

UIN IMAM BONJOL PADANG

sejumlah nagari, pertanggungjawaban aparatur atas dampak dan capaian program pembangunan yang dibiayai dari alokasi dana desa masih belum banyak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sementara aspek pelaporan administratif berupa penyusunan laporan keuangan pada umumnya telah berjalan cukup baik. Fenomena ini sejalan dengan fakta lapangan sebagaimana disinggung dalam latar belakang penelitian ini, di mana kasus penyalahgunaan dana desa oleh oknum Wali Nagari Nanggalo di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, senilai Rp123.000.000,00 pada tahun 2021 terjadi meskipun mekanisme pelaporan pertanggungjawaban formal telah tersedia. Kasus tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan laporan pertanggungjawaban semata belum tentu mencerminkan akuntabilitas substantif, sehingga sejalan dengan temuan penelitian ini bahwa akuntabilitas yang dipersepsikan tinggi oleh responden tidak serta-merta menekan potensi fraud apabila tidak disertai pengawasan yang konsisten dari pihak eksternal maupun internal.

Hasil ini berbeda dengan proposisi teoritis umum yang menyatakan bahwa akuntabilitas seharusnya memperkuat pencegahan fraud, karena akuntabilitas menuntut setiap individu untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang berkaitan dengan wewenang yang dimilikinya. Kemungkinan penyebab arah hubungan negatif ini adalah penerapan akuntabilitas yang masih bersifat formalitas administratif, tanpa disertai pengawasan substantif atas pertanggungjawaban tersebut, sehingga keberadaannya belum mampu menekan perilaku fraud secara nyata di lapangan.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui *Teori Good Governance* (Tata

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kelola Pemerintahan yang Baik), yang menempatkan akuntabilitas sebagai salah satu prinsip utama di samping transparansi, partisipasi, kepastian hukum, serta efektivitas dan efisiensi. Prinsip akuntabilitas dalam teori ini menuntut agar setiap penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab secara substantif, bukan hanya secara administratif, atas setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan wewenang yang dimilikinya kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.[109] Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dialkukan Sitawati dan Subeha juga menemukan bahwa akuntabilitas tidak memberikan pengaruh yang mendukung upaya pencegahan fraud, yang mengindikasikan bahwa penguatan sistem pelaporan pertanggungjawaban semata belum cukup efektif apabila tidak dibarengi dengan pengawasan dan penegakan yang konsisten.[110] Temuan serupa turut dikonfirmasi oleh Jeandry, Dara, dan Zainuddin yang menemukan arah koefisien regresi akuntabilitas yang negatif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, di mana peningkatan akuntabilitas yang tidak dibarengi kompetensi aparatur dan sistem pengendalian yang memadai justru berasosiasi dengan menurunnya efektivitas pencegahan kecurangan.[111] Penelitian Surbakti juga menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa, memperkuat indikasi bahwa akuntabilitas yang bersifat formalitas belum tentu meningkatkan

[109] United Nations Development Programme (UNDP), Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document, New York: UNDP, 1997, hlm. 2–3.
[110] Daniel Aditya Utama, Riana Sitawati, dan Subehan, "Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud, dengan Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening", Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK), Vol. 18, No. 2, 2022, hlm. 109–124.

[111] Gregorius Jeandry, Amin Dara, dan Zainuddin, "Pengelolaan Dana Desa Bebas Fraud: Pendekatan Efektif di Kecamatan Tidore Utara", Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 1125–1142.

efektivitas tata kelola.[112]

Kondisi ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas yang hanya berorientasi pada pemenuhan syarat pelaporan, tanpa diikuti budaya integritas yang kuat, berpotensi kurang efektif dalam mencegah tindakan kecurangan. Oleh karena itu, hasil ini menjadi catatan penting bahwa penguatan akuntabilitas perlu dibarengi dengan perbaikan kualitas pengawasan dan penegakan sanksi yang konsisten agar benar-benar berdampak terhadap pencegahan fraud.

Di sisi lain, tidak sedikit penelitian yang menemukan hasil berlawanan, yaitu bahwa akuntabilitas justru berperan positif dalam menekan kecurangan, sejalan dengan proposisi teoritis umum bahwa pertanggungjawaban yang jelas akan mendorong perilaku yang lebih terkontrol. Sari, Arza, dan Taqwa misalnya menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap penurunan potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Kulon Progo, yang menunjukkan bahwa ketika aparatur desa dituntut secara konsisten mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran, ruang untuk melakukan penyimpangan menjadi semakin sempit.[113] Eldayanti, Indraswarawati, dan Yuniasih juga membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, sejalan dengan temuan bahwa penguatan integritas dan kompetensi aparatur turut memperkuat efektivitas akuntabilitas dalam mencegah

UIN IMAM BONJOL PADANG

[112] Patricia Linda Surbakti, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dalam Upaya Pencegahan Fraud, pada Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, terhadap Kinerja Pemerintah Desa Pandayora Kabupaten Poso Menggunakan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi (Periode 2023–2024)", Global Accounting: Jurnal Akuntansi, Vol. 5, No. 1, 2026.
[113] M. E. Sari, F. I. Arza, dan S. Taqwa, "Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Internal terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa pada Kalurahan/Desa di Kabupaten Kulon Progo", Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 1443–1457.

fraud.[114] Demikian pula penelitian Risma, Raza, Murhaban, dan Ikhyanuddin menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengendalian internal dan pencegahan fraud pada SKPD Kabupaten Bireuen, yang mengindikasikan bahwa pada konteks satuan kerja perangkat daerah dengan sistem pelaporan yang lebih terstruktur, akuntabilitas cenderung berfungsi sebagaimana mestinya.[115] Perbedaan arah pengaruh akuntabilitas pada berbagai penelitian tersebut menegaskan bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada konteks penerapan, karakteristik objek penelitian, serta konsistensi pengawasan di lapangan. Pada penelitian yang menunjukkan hasil negatif atau tidak berpengaruh, akuntabilitas cenderung baru terwujud dalam bentuk pemenuhan syarat administratif berupa laporan pertanggungjawaban, tanpa disertai verifikasi substantif atas kebenaran laporan tersebut, sehingga keberadaannya belum mampu menutup celah kesempatan berbuat curang sebagaimana disyaratkan dalam elemen opportunity pada Fraud Triangle Theory. Sebaliknya, pada penelitian yang menunjukkan hasil positif, akuntabilitas umumnya diikuti oleh mekanisme audit dan evaluasi kinerja yang lebih ketat, sehingga pertanggungjawaban benar-benar berfungsi sebagai alat pengendalian, bukan sekadar formalitas pelaporan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3. **Pengaruh Pengendalian Internal (X3) terhadap Pencegahan Fraud (Y)**

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan nilai t*statistik* sebesar

[114] Ni Kadek Rai Eldayanti, S. A. P. A. Indraswarawati, dan N. W. Yuniasih, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa", Hita Akuntansi dan Keuangan, Universitas Hindu Indonesia, Vol. 1, No. 1, Juli 2020, hlm. 465–494.

[115] Mauliza Risma, Hendra Raza, Murhaban, dan Ikhyanuddin, "Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dengan Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bireuen)", Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), Vol. 3, No. 2, Juli 2024, hlm. 218–241.

2,509 (>1,66) dan P*value* sebesar 0,012 (<0,05), sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, dengan nilai *original sample* sebesar 0,258.

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh manajemen dan seluruh personel organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Semakin baik penerapan sistem pengendalian internal suatu organisasi, semakin kecil pula peluang terjadinya kecurangan, karena setiap aktivitas telah melalui mekanisme otorisasi, pemisahan tugas, dan pengawasan yang memadai.

Fakta lapangan turut memperkuat temuan ini. Di sejumlah kantor Wali Nagari di Kecamatan IV Jurai, praktik pemisahan wewenang antara fungsi otorisasi, pelaksanaan, dan pencatatan keuangan masih belum berjalan optimal, di mana tidak jarang satu orang aparatur merangkap lebih dari satu fungsi dalam pengelolaan keuangan nagari, misalnya bendahara yang turut terlibat dalam proses otorisasi maupun pengadaan barang dan jasa. Fakta lapangan lainnya menunjukkan bahwa mekanisme otorisasi berjenjang tetap diterapkan sebagai bentuk pengendalian internal, di mana pencairan dana nagari baru dapat dilakukan setelah memperoleh tanda tangan persetujuan dari Wali Nagari, sehingga tanda tangan tersebut berfungsi sebagai titik kendali (*control point*) untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dana telah melalui proses verifikasi dan otorisasi yang sah sebelum dicairkan. Kondisi ini menjadi catatan penting bahwa meskipun

UIN IMAM BONJOL PADANG

pengendalian internal secara keseluruhan terbukti berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, penguatan pada aspek pemisahan tugas dan otorisasi tetap perlu menjadi prioritas perbaikan ke depan agar celah kesempatan (*opportunity)* bagi terjadinya kecurangan dapat ditekan secara lebih optimal.

Temuan ini turut memperkuat landasan *Teori Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik), khususnya pada prinsip efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian hukum (*rule of law*), yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud apabila didukung oleh sistem dan struktur pengendalian yang memadai. Kerangka pengendalian internal yang mengacu pada komponen *COSO* turut menegaskan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang berjalan secara terintegrasi merupakan wujud nyata penerapan prinsip-prinsip *good governance* tersebut dalam mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan sejak dini.[116]

Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Suwarsa dan Sianipar yang menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pada berbagai jenis organisasi.[117] Penelitian Herlita dan Bayunitri lain juga menegaskan bahwa efektivitas pengendalian internal berperan penting dalam menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan curang.[118] Penelitian Atmadja dan Saputra turut memperkuat temuan ini

[116] United Nations Development Programme (UNDP), Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document, New York: UNDP, 1997, hlm. 2–3.
[117] Toto Suwarsa dan Christine Sianipar, "Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Bank Bjb Cabang Sukajadi", Land Journal, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 203–214.
[118] Siska Herlita dan Bunga Indah Bayunitri, "Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung)", Jurnal Akuntansi Bisnis

UIN IMAM BONJOL PADANG

dengan membuktikan bahwa kompetensi personel dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. [119] Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguatan sistem pengendalian internal merupakan salah satu langkah strategis yang perlu terus dioptimalkan dalam upaya pencegahan fraud.

Meskipun demikian, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang konsisten mengenai peran pengendalian internal, sehingga temuan pada penelitian ini perlu dimaknai secara proporsional dan tidak digeneralisasi tanpa mempertimbangkan konteks objek penelitian. Kristuti, Amalia, dan Wicaksono misalnya menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Banyakan, sementara spiritualitas dan kepercayaan antarpersonel justru terbukti lebih berperan dalam mencegah kecurangan, yang mengindikasikan bahwa pada objek penelitian tersebut faktor nilai dan moral individu memiliki daya cegah yang lebih kuat dibandingkan prosedur pengendalian formal. [120] Ayem dan Kusumasari juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh langsung terhadap pencegahan fraud, dan baru berpengaruh signifikan apabila dimediasi oleh akuntabilitas, sehingga keberadaan prosedur pengendalian formal tanpa disertai budaya pertanggungjawaban yang kuat belum tentu cukup untuk menekan peluang kecurangan.[121] Hidayat dan Susilowati turut menemukan bahwa

UIN IMAM BONJOL PADANG

dan Ekonomi (JABE), Vol. 7, No. 1, Maret 2021, hlm. 1805–1830.

[119] Anantawikrama Tungga Atmadja dan Komang Adi Kurniawan Saputra, "Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 12, No. 1, 2017, hlm. 7–16.

[120] Gresita Mahar Kristuti, Firda Ayu Amalia, dan Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono, "Determinan Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa", Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 23, No. 1, Februari 2023, hlm. 61–79.

[121] Sri Ayem dan K. F. Kusumasari, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap

sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Delanggu, yang mengindikasikan bahwa keberadaan sistem pengendalian semata belum cukup tanpa disertai konsistensi implementasi, pemisahan tugas yang jelas, serta pengawasan berjenjang di lapangan.[122] Ketidakkonsistenan hasil antarpenelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dalam mencegah fraud sangat dipengaruhi oleh sejauh mana komponen-komponennya, seperti lingkungan pengendalian, pemisahan tugas, dan pemantauan berkelanjutan, benar-benar dijalankan secara utuh dan bukan hanya berhenti pada tataran regulasi tertulis. Pada objek penelitian yang menunjukkan hasil positif dan signifikan, pengendalian internal umumnya telah didukung oleh komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia yang memadai, serta budaya organisasi yang mendorong kepatuhan, sedangkan pada objek penelitian yang menunjukkan hasil sebaliknya, penerapan pengendalian internal masih bersifat prosedural dan belum ditopang oleh faktor pendukung tersebut.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Mediasi", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 160–169

[122] Triawan Hidayat dan Heni Susilowati, "Pencegahan Fraud Dana Desa Melalui Kepatuhan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus di Kecamatan Delanggu", Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 6, No. 1, Maret 2026.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Kantor Wali Nagari di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa (Studi Pada Kantor Wali Nagari di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan**).** Hasil penelitian ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi keuangan yang diterapkan oleh pemerintah nagari kepada masyarakat, maka semakin tinggi pula efektivitas pencegahan fraud yang dapat dicapai. Hal ini dikarenakan keterbukaan informasi mempersempit ruang gerak bagi terjadinya penyimpangan, sebab setiap penggunaan anggaran dapat dipantau dan diawasi secara langsung oleh masyarakat maupun pihak pengawas.

2. Akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa (Studi Pada Kantor Wali

UIN IMAM BONJOL PADANG

Nagari di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas yang dipersepsikan oleh aparatur nagari belum mampu menekan terjadinya fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa, sebuah temuan yang berbeda dari proposisi teoritis umum. Hal ini dikarenakan pelaksanaan akuntabilitas di lapangan cenderung masih bersifat formalitas administratif, yakni sebatas pemenuhan kewajiban pelaporan tanpa disertai pengawasan substantif, sehingga belum mampu menekan perilaku fraud secara nyata.

3. Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa (Studi Pada Kantor Wali Nagari di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal oleh aparatur nagari, maka akan semakin kecil pula peluang terjadinya kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini dikarenakan pemisahan tugas, otorisasi transaksi yang jelas, dan pengawasan yang memadai mempersempit celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan curang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan, di antaranya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen (transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal), sehingga belum mencakup faktor-

faktor lain yang berpotensi memengaruhi pencegahan fraud seperti kompetensi aparatur, moralitas individu, budaya organisasi, atau whistleblowing system.

2. Lokasi penelitian terbatas hanya di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan pada wilayah nagari lain dengan karakteristik sosial dan tata kelola yang berbeda.

3. Data penelitian bersifat persepsional yang diperoleh melalui kuesioner, sehingga terdapat kemungkinan bias jawaban responden dalam menilai kondisi transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal di nagari masing-masing, sehingga hasil penelitian ini perlu dimaknai secara hati-hati dan idealnya dilengkapi dengan data observasi atau wawancara langsung di lapangan

4. Ditemukannya arah pengaruh akuntabilitas yang negatif terhadap pencegahan fraud memerlukan kajian lebih lanjut, mengingat hasil ini berbeda dari sebagian besar temuan penelitian terdahulu, sehingga interpretasinya perlu didukung oleh pendekatan kualitatif tambahan agar dapat digali lebih mendalam.

UIN IMAM BONJOL PADANG

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Nagari di Kecamatan IV Jurai

Pemerintah nagari disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa, misalnya melalui penyediaan papan informasi anggaran yang mudah diakses, publikasi laporan keuangan secara berkala, serta pemanfaatan media digital desa. Selain itu, penerapan akuntabilitas perlu diperkuat tidak hanya secara administratif (pelaporan), tetapi juga secara substantif melalui pengawasan aktif oleh Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dan penegakan sanksi yang konsisten agar akuntabilitas benar-benar berdampak terhadap pencegahan fraud.

2. Bagi Pemerintah Daerah/Kabupaten Pesisir Selatan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi pengawas (seperti Inspektorat Daerah) dalam merancang program pembinaan dan pendampingan pengendalian internal di tingkat nagari, khususnya terkait pemisahan tugas dan prosedur otorisasi yang masih menjadi titik lemah dalam pengelolaan dana desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain di luar model penelitian ini, seperti kompetensi aparatur, moralitas, budaya organisasi, atau

UIN IMAM BONJOL PADANG

whistleblowing system, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan pencegahan fraud. Selain itu, disarankan untuk memperluas lokasi penelitian ke kecamatan atau kabupaten lain agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan lebih luas, serta mempertimbangkan pendekatan mixed-method untuk mendalami temuan pengaruh negatif akuntabilitas terhadap pencegahan fraud yang ditemukan dalam penelitian ini.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners). (2020). *Report to the Nations*.

Al Hakim, R., Mustika, I., & Yuliani, W. (2021). Validitas dan Reliabilitas Angket Motivasi Berprestasi. *Jurnal Pendidikan*, 4(4), 263–268.

Anggeli, F. S., & Andajani. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(1).

Aprianti, S., & Asyik, N. F. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(12), 1–15.

Arifiyanto, F. A., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473–485.

Astuty, E. D., & Fanida, E. H. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dharma Bhakti Kecamatan Sungai Raya. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 673–687.

Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. (2018). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(1), 7–20.

Atmadja, A. W., & Saputra, K. A. (2018). Determinan Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(1), 1–14.

Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2112–2120.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). *Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Tahun 2023*.

Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.

Bastian, I. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga.

Biduri, S., Fitriyah, H., & Febriana, P. (2022). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4021–4036.

Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.

Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.), *Modern Methods for Business Research* (pp. 295–336). Lawrence Erlbaum Associates.

Christian, & Veronica. (2022). Dampak Fraud di Sektor Publik terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control—Integrated Framework: Executive Summary*. AICPA.

Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press.

Dewi, A. S. M. W., & Gayatri, G. A. Y. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(1), 86–95.

Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340.

Elviani, D., Ali, S., & Kurniawan, R. (2020). Pengaruh Kecurangan Laporan Keuangan terhadap Nilai Perusahaan: Ditinjau dari Perspektif Fraud Pentagon. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 121–125.

Fernanda, J. W., Luthfiana, V., & Akhyar, M. K. (2022). Analisis Partial Least Square Structural Equation Model (PLS-SEM) untuk Permodelan Penerimaan Sistem Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah (JIBAS). *Jurnal Ilmiah Teori dan Aplikasi Statistika*, 15(2), 293.

Fitriana, N., Paramarta, V., & Santoso, R. A. (2024). Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta Tahun 2020–2024. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 16285–16302.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50.

Furadantin, N. R. (2020). *Analisis Data Menggunakan Aplikasi Smart PLS V.3.2.7*.

Gunistiyo, Noviany, D., & Prihadi, D. (2024). *Metodologi Penelitian Modern: Panduan SmartPLS yang Praktis untuk Peneliti*. Universitas Pancasakti

Tegal.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2019). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Sage Publications.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 5). Salemba Empat.

Haneda, J. E., & Carolina, Y. (2022). COSO ERM and the Role of Internal Auditors in Fraud Prevention (Survey on Internal Auditors in Indonesia). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(2), 325–334.

Hartono, A. B., & Nugroho, A. H. D. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(1).

Hasthoro, H. M., & Sunardi. (2016). Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(1), 53–68.

Herdiansah, J., Kartini, D., & Hendriyani, R. (2020). Efektivitas Pengendalian Internal dalam Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(1), 23–35.

Herlita, S., & Bayunitri, B. I. (2021). *Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Kota Bandung)*.

Iba, Z., & Wardhana, A. (2024). *Uji Validitas dan Reliabilitas pada Data Penelitian Kuantitatif*. CV. Eureka Media Aksara.

Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. ICW.

Indonesia Corruption Watch (ICW). (2025). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*. ICW.

Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13.

Julita, E., & Abdullah, S. (2020). Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 213–221.

Kasidi. (2014). *Manajemen Risiko*. Ghalia Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024*.

Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi. *Ekonomika-Bisnis*, 2(2), 357–370.

LAN, & BPKP. (2000). *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP, Modul 3 dari 5)*. LAN.

Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 29(3), 1120–1129.

Livia, A. F., Nursalma, & Sari, M. S. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Good Government Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Pakuan Ratu Kab. Way Kanan). *AKUNTANSI 45*, 5(1), 44–55.

Lusiana, F., Aziz, N., & Idawati, W. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2), 1–15.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Penerbit Andi.

Megasyara, I., & Imawan, A. (2023). Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 512–528.

Murtin, A., Indrasari, B. A., & Putra, A. Z. (2024). Faktor-faktor yang Memengaruhi Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 75–86.

Nada, I. Q. N., & Kirana, N. W. I. (2025). Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi Perangkat Desa, dan Employee Productivity Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 5(4), 159–174.

Noya, J., Silooy, R. W., & Limba, F. B. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan

Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Desa-desa di Kecamatan Saparua). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(4), 278–292.

Nurdiono, Inapty, B. A., & Kamayanti, A. (2019). Pengelolaan Dana Desa: Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 336–352.

Nurhalizah, S., Kholijah, G., & Gusmanely. (2023). Analisis Structural Equation Modeling Partial Least Square pada Kinerja Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 6(2), 30.

Nurhidayanti, M. (2025). Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 23–30.

Padang TV. (t.t.). *Wali Nagari Nanggalo Diberhentikan* [Video]. Facebook.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298.

Putra, M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 28(1), 132–158.

Rahayu, F., dkk. (2021). Upaya Pencegahan Kecurangan dalam Mengelola Dana Desa Sesuai dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi. *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 130–140.

Rahmah, D. N., Handoyono, R., & Al Farizi, M. (2025). The Influence of Government Internal Control System and Good Governance on Fraud Prevention. *Applied Accounting and Management Review (AAMAR)*, 4(2).

Rasyid, R. (1998). Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 15–28.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Ruzain, M., Novianti, N., & Amrullah, M. M. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dengan Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bireuen).

Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), 3(2), 1–15.

SA, A., & Martadinata, S. (2023). Pengaruh Moralitas dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Fraud pada Pemerintah Desa pada Kecamatan Moyo Hulu. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 3(2).

Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176.

Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2017). Partial Least Squares Structural Equation Modeling. In C. Homburg, M. Klarmann, & A. Vomberg (Eds.), *Handbook of Market Research*. Springer.

Siregar, H. D., dkk. (2022). Analisis Uji Hipotesis Penelitian Perbandingan Menggunakan Statistik Parametrika. *Al Itihadu: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 5.

Soesana, A. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Kita Menulis.

Suciana, S., Widiastuti, C. T., & Meiriyanti, R. (t.t.). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Good Governance sebagai Variabel Intervening*.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.

Susandya, A. A. P. G. B. A., Putra, M. D. P., Bagiana, I. K., Cahyani, M. R., & Aristanti, I. A. P. M. P. (2022). Determinan Pencegahan Kecurangan dalam Alokasi Dana Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(3).

Susilowati. (t.t.). [Judul tidak lengkap dalam naskah asli]. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(6), 8025–8038.

Susilowati, E., Ratminto, & Rahayu, N. P. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 22(1), 1–14.

Suwarsa, T., & Sianipar, C. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Bank BJB Cabang Sukajadi. *LAND Journal*, 5(1), 203–214.

Tritjahjo. (2019). *Ragam dan Prosedur Penelitian Tindakan*. Satya Wacana University Press.

Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (Edisi 2).

Salemba Empat.

Tuanakotta, T. M. (2014). *Audit Berbasis ISA*. Salemba Empat.

United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. UNDP.

Utama, D. A., Sitawati, R., & Subehan. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud, dengan Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening. *JRAK*, 18(2), 109–124.

Wati, A., & Yuniasih. (2021). Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, dan Budaya Etis Manajemen Terhadap Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Dana Desa. *HITA Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 118–130.

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 1–10.

Widyatama, R., Adiputra, K., & Darmawan, N. A. S. (2017). Pengaruh Kompetensi, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Desa. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.

Wildayanti, S. D., Monoarfa, R., & Usman, U. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal dan Transparansi terhadap Pencegahan Kecurangan pada Laporan Keuangan. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 115–122.

Lampiran 1
Koesioner Penelitian

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Identitas Responden

Nama Desa/Nagari : .....

Jenis Kelamin : □ Laki-laki □ Perempuan

Jabatan : □ Wali Nagari □ Bendahara Desa
□ Sekretaris Nagari □ Ketua Badan Musyawarah Nagari (Bamus)

Pendidikan Terakhir : □ SMA □ D3
□ S1 □ S2
□ Lain-lain (.....)

Petunjuk pengisian kuesioner:

1. Mohon dengan hormat, bantuan dan kesediiannya Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pernyataan/pertanyaan dalam kuesioner ini.
2. Tidak ada pernyataan benar atau salah. Bapak/Ibu mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan/pertanyaan tersebut. Dalam hal ini saya ingin mengetahui seberapa jauh Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut
3. Mohon memberi tanda centang (√) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai.
4. Tiap pertanyaan hanya diperkenankan ada satu jawaban.
5. Setelah mengisi kuesioner ini mohon Bapak/Ibu memberikan kembali kepada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali.
6. Terdapat 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pernyataan, yaitu:

SS	:	Sangat Setuju	(5)
S	:	Setuju	(4)
N	:	Netral	(3)
TS	:	Tidak Setuju	(2)
STS	:	Sangat Tidak Setuju	(1)

Daftar pertanyaan:

A. Transparansi (X1)

Kejelasan Informasi						
NO	**Pertayaan**	**SS**	**S**	**N**	**TS**	**STS**
1.	Laporan keuangan dan realisasi anggaran desa dipublikasikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat					
Kemudahan Akses						
2.	Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi pengelolaan keuangan desa melalui papan informasi atau media lainnya					
3.	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa tersedia dan dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan					
4.	Pemerintah desa menyediakan sarana komunikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pertanyaan atau permintaan informasi terkait penggunaan anggaran					
Keterlibatan Masyarakat						
5.	Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa melalui musyawarah desa					
Proses Pengawasan						
6.	Terdapat mekanisme pengawasan yang memungkinkan masyarakat atau lembaga terkait memantau dan mengevaluasi penggunaan dana desa secara berkala					

B. Akuntabilitas (X2)

Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum						
NO	**Pertayaan**	**SS**	**S**	**N**	**TS**	**STS**
1.	Aparat desa dalam mengelola keuangan desa selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari penyalahgunaan wewenang					
Akuntabilitas Proses						

2.	Setiap prosedur pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku					
3.	Laporan keuangan desa disusun secara tepat waktu dan menggunakan sistem pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan					
Akuntabilitas Program						
4.	Program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang optimal bagi warga desa					
5.	Pemerintah desa selalu melaporkan hasil pelaksanaan program kepada masyarakat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan					
Akuntabilitas Kebijakan						
6.	Kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik					

C. Pengendalian Internal (X3)

Lingkungan Pengendalian						
NO	**Pertayaan**	**SS**	**S**	**N**	**TS**	**STS**
1.	Terdapat aturan tatakelola SDM mulai dari rekruitmen sampai pemberhentian					
2.	Terdapat komunikasi yang baik antar apparat yang berhubungan dengan program yang sedang dikerjakan					
Penilaian Resiko						
3.	Aparat dapat melakukan perencanaan pengendalian berkaitan dengan resiko yang akan dihadapi dalam setiap kegiatan sesuai dengan tingkat kesulitan dalam penyusunan laporan penggunaan dana					

4.	Aparat selalu mengidentifikasi pengaruh dari luar dan dari dalam organisasi yang berdampak pada setiap kegiatan penyusunan laporan keuangan,serta mengidentifikasi risiko yang berdampak pada kinerja pemerintahan desa					
Aktivitas Pengendalian						
5.	Terdapat otorisasi yang jelas atas transaksi dan aktivitas yang terjadi					
6.	Menggunakan kode account sesuai dengan transaksinya.					
Informasi dan Komunikasi						
7.	Terdapat hardware (komputer) yang mendukung penyusunan laporan keuangan instansi pemerintahan					
8.	Menggunakan aplikasi (software) dari pemerintah guna mendukung penyusunan laporan keuangan					
Pemantauan						
9.	Instansi pemerintah selalu melakukan evaluasi tentang kelebihan dan kelemahan serta membuat rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian internal					

D. Pencegahan Fraud (Y)

Analisis Risiko						
NO	**Pertayaan**	**SS**	**S**	**N**	**TS**	**STS**
1.	Pemerintah desa melakukan identifikasi dan penilaian risiko terjadinya fraud dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa secara berkala					
2.	Terdapat mekanisme pelaporan risiko fraud yang memungkinkan aparat desa melaporkan potensi kecurangan kepada pihak yang berwenang					
Implementasi						

3.	Pemerintah desa telah menerapkan prosedur dan kebijakan anti-fraud secara konsisten dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa					
Hukuman						
4.	Pemerintah desa memberikan sanksi yang tegas dan proporsional kepada aparat desa yang terbukti melakukan tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa					
5.	Proses pemberian hukuman atau sanksi terhadap pelaku fraud di pemerintahan desa dilakukan secara transparan dan dapat diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk efek jera					
Tinjauan						
6.	Dilakukan tinjauan dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program pencegahan fraud yang telah diterapkan di pemerintahan desa					

Jawaban Kusioner

A. Transparansi (X1)

Kejelasan Informasi						
NO	**Pertayaan**	**SS**	**S**	**N**	**TS**	**STS**
1.	Laporan keuangan dan realisasi anggaran desa dipublikasikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat	67	13			
Kemudahan Akses						
2.	Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi pengelolaan keuangan desa melalui papan informasi atau media lainnya	69	10	1		
3.	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa tersedia dan dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan	19	20	28	13	
4.	Pemerintah desa menyediakan sarana komunikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pertanyaan atau permintaan informasi terkait penggunaan anggaran	24	34	22		
Keterlibatan Masyarakat						
5.	Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa melalui musyawarah desa	23	39	15	3	
Proses Pengawasan						
6.	Terdapat mekanisme pengawasan yang memungkinkan masyarakat atau lembaga terkait memantau dan mengevaluasi penggunaan dana desa secara berkala	41	33	6		

B. Akuntabilitas (X2)

Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum						
NO	**Pertayaan**	**SS**	**S**	**N**	**TS**	**STS**

1.	Aparat desa dalam mengelola keuangan desa selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari penyalahgunaan wewenang	38	26	10	6	
Akuntabilitas Proses						
2.	Setiap prosedur pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku	20	35	17	8	
3.	Laporan keuangan desa disusun secara tepat waktu dan menggunakan sistem pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan	20	31	19	11	
Akuntabilitas Program						
4.	Program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang optimal bagi warga desa	21	19	27	13	
5.	Pemerintah desa selalu melaporkan hasil pelaksanaan program kepada masyarakat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	27	35	18		
Akuntabilitas Kebijakan						
6.	Kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik	41	26	13		

C. Pengendalian Internal (X3)

Lingkungan Pengendalian						
NO	**Pertayaan**	**SS**	**S**	**N**	**TS**	**STS**
1.	Terdapat aturan tatakelola SDM mulai dari rekruitmen sampai pemberhentian	9	44	21	6	
2.	Terdapat komunikasi yang baik antar apparat yang berhubungan dengan program yang sedang dikerjakan	6	46	22	6	
Penilaian Resiko						

3.	Aparat dapat melakukan perencanaan pengendalian berkaitan dengan resiko yang akan dihadapi dalam setiap kegiatan sesuai dengan tingkat kesulitan dalam penyusunan laporan penggunaan dana	27	50	3		
4.	Aparat selalu mengidentifikasi pengaruh dari luar dan dari dalam organisasi yang berdampak pada setiap kegiatan penyusunan laporan keuangan,serta mengidentifikasi risiko yang berdampak pada kinerja pemerintahan desa	14	36	17	13	
Aktivitas Pengendalian						
5.	Terdapat otorisasi yang jelas atas transaksi dan aktivitas yang terjadi	11	28	25	16	
6.	Menggunakan kode account sesuai dengan transaksinya.	20	39	15	6	
Informasi dan Komunikasi						
7.	Terdapat hardware (komputer) yang mendukung penyusunan laporan keuangan instansi pemerintahan	26	46	17	8	
8.	Menggunakan aplikasi (software) dari pemerintah guna mendukung penyusunan laporan keuangan	26	46	7	1	
Pemantauan						
9.	Instansi pemerintah selalu melakukan evaluasi tentang kelebihan dan kelemahan serta membuat rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian internal	9	41	25	5	

D. Pencegahan Fraud (Y)

Analisis Risiko						
NO	**Pertayaan**	**SS**	**S**	**N**	**TS**	**STS**

1.	Pemerintah desa melakukan identifikasi dan penilaian risiko terjadinya fraud dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa secara berkala	17	51	12		
2.	Terdapat mekanisme pelaporan risiko fraud yang memungkinkan aparat desa melaporkan potensi kecurangan kepada pihak yang berwenang	11	55	9		
Implementasi						
3.	Pemerintah desa telah menerapkan prosedur dan kebijakan anti-fraud secara konsisten dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa	11	55	9	5	
Hukuman						
4.	Pemerintah desa memberikan sanksi yang tegas dan proporsional kepada aparat desa yang terbukti melakukan tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan desa	67	13			
5.	Proses pemberian hukuman atau sanksi terhadap pelaku fraud di pemerintahan desa dilakukan secara transparan dan dapat diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk efek jera	44	36			
Tinjauan						
6.	Dilakukan tinjauan dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program pencegahan fraud yang telah diterapkan di pemerintahan desa	46	34			

Tabulasi Data

NO	Nama	Desa/Nagari	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan Akhir	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
1	Harwal Nurdin	Painan	Laki-Laki	Wali Nagari	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	5	4	4	4	4	4	3
2	Baswardi	Painan	Laki-Laki	Sekretaris Nagari	SMA	5	3	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	3	4	4	5	4	4	3	5	3	4	4	4	3	3
3	Yulia Fitri	Painan	perempuan	Bendahara Nagari	D3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5
4	Vekim Suhatlan	Painan	Laki-Laki	Ketua Bamus	S1	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	4	3	5	4	5	5
5	Rovel Yudhiatma	Painan Selatan	Laki-Laki	Wali Nagari	S1	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
6	Ferdiansyah Saputra	Painan Selatan	Laki-Laki	Sekretaris Nagari	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	Clara Vischa	Painan Selatan	Perempuan	Bendahara Nagari	D3	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4
8	Joniwar	Painan Selatan	Laki-Laki	Ketua Bamus	SMA	3	3	3	4	3	3	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	4	5	3	3	3	3	3	3
9	Hendra Ardison C	Painan Timur	Laki-Laki	Wali Nagari	S1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3
10	Yurmia	Painan Timur	perempuan	Sekretaris Nagari	S1	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	Susi Handayani	Painan Timur	Perempuan	Bendahara Nagari	S1	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	Fajri Fauzan	Painan Timur	Laki-Laki	Ketua Bamus	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	Roni Marta G	Salido	Laki-laki	Wali Nagari	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	Sasmawida	Salido	Perempuan	Sekretaris	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	Yusma Yenti	Salido	Perempuan	Bendahara Nagari	S1	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
16	Maswandi	Salido	Laki-Laki	Ketua Bamus	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	Fandy	Lumpo	Laki-Laki	Wali Nagari	S1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
18	Sari Rahma Juita, SE	Lumpo	perempuan	Sekretaris Nagari	S1	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5
19	Afri Ramadini, A.Md	Lumpo	Laki-Laki	Bendahara Nagari	S1	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	5

20	Novrizal	Lumpo	Laki-Laki	Ketua Bamus	SMA	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
21	Rina Crisnanda	Sago Salido	Perempuan	Wali Nagari	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5	5
22	Ayu Azari, S.Pd.I	Sago Salido	Perempuan	Sekretaris Nagari	S1	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	3	3	5	5	5	5	5
23	Novriato	Sago Salido	Laki-Laki	Bendahara Nagari	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5
24	Irma yunita	Sago Salido	Perempuan	Ketua Bamus	SMA	3	5	3	3	3	3	5	4	5	4	5	5	3	3	4	4	4	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3
25	Hayunni Alfitri	Bungo Pasang	Perempuan	Wali Nagari	SMA	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	3	3	4	3
26	Maiza Putri	Bungo Pasang	Perempuan	Sekretaris Nagari	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
27	Safrizal	Bungo Pasang	laki-Laki	Bendahara Nagari	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
28	Masri	Bungo Pasang	Laki-Laki	Ketua Bamus	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
29	Adi Candra	Salido Sari Bulan	Laki-Laki	Wali Nagari	SMA	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5
30	Reki Candra	Salido Sari Bulan	Laki-Laki	Sekretaris Nagari	SMA	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4
31	Muhammad Zulkifli	Salido Sari Bulan	Laki-Laki	Bendahra Nagari	SMA	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
32	Elsa Putri	Salido Sari Bulan	perempuan	Ketua Bamus	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	Mawar Saputri	Tambang	perempuan	Wali Nagari	SMA	5	5	5	3	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	Neneng Nuriati	Tambang	perempuan	Sekretaris Nagari	SMA	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5
35	Edrawati	Tambang	perempuan	Bendahra Nagari	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
36	Arman	Tambang	Laki-Laki	Kelapa Kampung	SMA	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
37	Cun Afrijoni	Koto Rawang	Laki-Laki	Wali Nagari	S1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
38	Nofriedi, S.H	Koto Rawang	Laki-Laki	Sekretaris Nagari	SMA	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
39	Fitmawati	Koto Rawang	Perempuan	Bendahra Nagari	SMA	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
40	Helni Nofrianti	Koto Rawang	perempuan	Bendahara	S1	5	5	5	4	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5

41	Reno Elvi Oktara, S.Pd	Balai Sinayan	Laki-Laki	Wali Nagari	S1	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	5	5
42	HelenPuspita Sari,S.Pd.I	Balai Sinayan	Perempuan	Sekretaris Nagari	S1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
43	Mahardicka, SH	Balai Sinayan	Laki-laki	Bendahra Nagari	SMA	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5
44	Ernanelis	Balai Sinayan	Perempuan	Ketua Bamus	S1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
45	Ayu Rahayu, S.Pd.I	Ampang Tareh	Perempuan	Wali Nagari	SMA	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5
46	Syamsyudin	Ampang Tareh	Laki-Laki	Sekretaris Nagari	S1	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5
47	Ahmad Fandy Pinayungan, S.HI	Ampang Tareh	Laki-Laki	Bendahra Nagari	S1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
48	Fitriani Kharisma	Ampang Tareh	perempuan	Ketua Bamus	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
49	Syatrial		Laki-Laki	Wali Nagari	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
50	Indra Wasif, S.pd	Bukik Kaciak	Laki-Laki	Sekretaris Nagari	SMA	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
51	Syofi Andriko	Bukik Kaciak	Laki-Laki	Bendahra Nagari	S1	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
52	Juswardi	Bukik Kaciak	Laki-Laki	Ketua Bamus	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5
53	Hadis Hermanto Dt Rj Nansati	Sungai Sariak	Laki-Laki	Wali Nagari	SMA	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	5	5	5	4	4		
54	Rani Mustuti	Sungai Sariak	Perempuan	Sekretaris Nagari	SMA	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	
55	Hayati Nurlela	Sungai Sariak	Perempuan	Bendahra Nagari	SMA	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
56	Resi Oktaria	Sungai Sariak	Perempuan	Ketua Bamus	D3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
57	Doni Iskandar	Gunung Bungkuk	laki-Laki	Wali Nagari	S1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
58	Rangga MIlam P	Gunung Bungkuk	Laki-Laki	Sekretaris Nagari	D3	3	4	5	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
59	Aisyah	Gunung Bungkuk	Perempuan	Bendahra Nagari	SMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	
60	Dosi Pardial	Gunung	Laki-Laki	Ketua Bamus	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	

		Bungkuk																														
61	Aziyul Nafri, SH	Ampuan	Laki-Laki	Wali Nagari	S1	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
62	Butrial	Ampuan	perempuan	Sekretaris Nagari	SMA	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	4
63	Pebrika Metta	Ampuan	perempuan	Bendahara	SMA	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
64	Depi Permai Sari	Ampuan	perempuan	Ketua Bamus	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
65	Nofinol Edi	Sungai Gayo	Laki-Laki	Wali Nagari	S1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	Mai Rahmadani	Sungai Gayo	Perempuan	Sekretaris Nagari	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
67	Yulta Susanti	Sungai Gayo	Perempuan	Bendahara Nagari	SMA	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
68	Dwi Septine P	Sungai Gayo	Perempuan	Ketua Bamus	S1	3	4	3	4	3	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
69	Dewel Colivetra	Taratak Tangah	Laki-Laki	Wali Nagari	SMA	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
70	Nurnaningsih	Taratak Tangah	perempuan	Sekretaris Nagari	SMA	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
71	Respi Lestari	Taratak Tangah	Perempuan	Bendahara Nagari	S1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
72	Arsif Chan	Taratak Tangah	Laki-Laki	Ketua Bamus	SMA	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
73	Syafriyil	Batu Kunik	Laki-laki	Wali Nagari	SMA	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
74	Afriandi	Batu Kunik	Laki-laki	Sekretaris Nagari	SMA	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
75	Wilda Yanti	Batu Kunik	Perempuan	Bendahara Nagari	S1	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
76	Supetriadi	Batu Kunik	Laki-Laki	Ketua Bamus	SMA	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
77	Nasrul	Limau Gadang	Laki-Laki	Wali Nagari	SMA	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	5	5	3	5	5	4	5	5
78	Zulbadri	Limau Gadang	Laki-Laki	Sekretaris Nagari	S1	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4
79	Elpi Rahmi	Limau Gadang	Perempuan	Bendahara Nagari	S1	5	5	4	5	5	3	4	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
80	Juli Imam Bonsu	Limau Gadang	Laki-Laki	Ketua Bamus	SMA	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5

Lampiran 2

1. Uji *Convergent Validity*

Outer loadings - Matrix

	Akuntabilitas	Pencegahan Fraud	Pengendalian Internal	Trasnparansi
X1.1				0.914
X1.2				0.780
X1.3				0.799
X1.4				0.753
X1.5				0.761
X1.6				0.854
X2.1	0.770			
X2.2	0.754			
X2.3	0.818			
X2.4	0.758			
X2.5	0.723			
X2.6	0.916			
X3.1			0.794	
X3.2			0.839	
X3.3			0.764	
X3.4			0.757	
X3.5			0.758	
X3.6			0.718	
X3.7			0.846	
X3.8			0.800	
X3.9			0.728	
Y1		0.725		
Y2		0.826		
Y3		0.943		
Y4		0.900		
Y5		0.922		
Y6		0.810		

2. *Average variance extracted (AVE)*

Copy to Excel/Word | Copy to R

Average variance extracte...	
0.660	
0.628	
0.608	
0.736	

3. *Composite reliability*

Composite reliability (rho_c)
0.921
0.910
0.933
0.943

4. *Crombach alpha*

Construct reliability and validity -

	Cronbach's alpha
X1.	0.896
X2.	0.880
X3	0.921
Y	0.926

Construct reliability and validity - Overview

Copy to Excel/Word | Cop

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho...	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracte...
X1.	0.896	0.902	0.921	0.660
X2.	0.880	0.894	0.910	0.628
X3	0.921	0.957	0.933	0.608
Y	0.926	0.941	0.943	0.736

5. Uji *R-Square* (R^2)

R-square - Overview

	R-square	R-square adjusted
Y	0.845	0.839

6. Uji Hipotesis *(Bootstrapping)*

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values

Copy to Excel/Word

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
X1. -> Y	0.786	0.798	0.079	10.010	0.000
X2. -> Y	-0.152	-0.144	0.060	2.539	0.011
X3 -> Y	0.258	0.245	0.103	2.509	0.012

Lampiran 3

Surat Izin Penelitian

1/1

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Sungai Bangek, Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah- Padang
http://febi.uinib.ac.id / Email: admin_febi@uinib.ac.id

4 Juni 2026

Nomor : B.0999 /Un.18/FEBI/PP.00.4/06/2026
Lamp. : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Wali nagari dikecamatan IV jurai
di
Pesisir selatan

Assalamu"alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak/Ibuk, bahwa :

Nama	:	Melani Putri
NIM	:	2216040021
Smt/ Jurusan	:	VIII / Akuntansi Syariah

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang yang akan *melakukan riset lapangan* untuk kepentingan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) :

Judul	:	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Lokasi Riset	:	Di Kantor wali nagari yang terdapat di IV jurai
Waktu Riset	:	04 Juni s/d 04 Juli 2026
Dalam Rangka	:	Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi).

Sehubungan dengan maksud di atas maka kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan pengambilan data dalam memenuhi penulisan Karya Ilmiah (Skripsi).

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dr. Roni Andespa, SE.,MM
NIP. 198311112015031001

Balasan

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO
Jln.Nagari Gunung Bungkuak Email: nagari.gunungbungkuaklumpo@gmail.com Kode Pos: 25651

SURAT PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN
NOMOR:144/ 87 /SP/N-GBL/VI-2026

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang
Di padang:

Sehubung surat Saudara Nomor B.0999 /Un.18/Febi/PP.00.4/06/2026 tanggal 10 Juni 2026 hal Izin Penelitian, Pada prinsipnya kami menyetujui untuk dilakukan penelitian dan pengambilan data oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama	: Melani Putri
Nim	: 2216040021
Program Studi	: Akuntansi Syariah

Demikian dengan judul "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa", sepanjang kegiatan penelitian dan pengambilan data tersebut tidak terkait dengan substansi hasil pengawasan.

Perlu kami informasikan bahwa satu eksemplar laporan hasil penelitian tersebut agar disampaikan kepada kami sebagai arsip pada nagari Gunung Bungkuk Lumpo.

Demikina kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kamiucapkan terima kasih.

Gunung Bungkuak Lumpo, 11 Juni 2026
A/N PJ Wali Nagari
Gunung Bungkuak Lumpo
Sekretaris Nagar

RANGGA MILAM PUTRA.S.Pd.I

Dokumentasi




























DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONES






























TAHUN 2020








NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN


CEPAT
EFISIEN
AMAN
TRANSPARAN

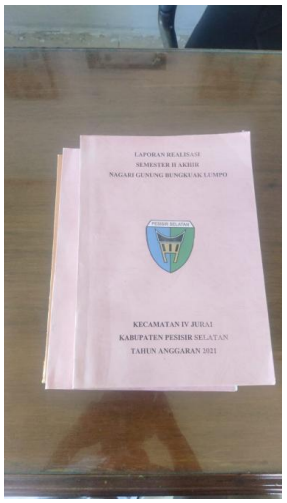
LAPORAN REALISASI
SEMESTER II AKHIR
NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

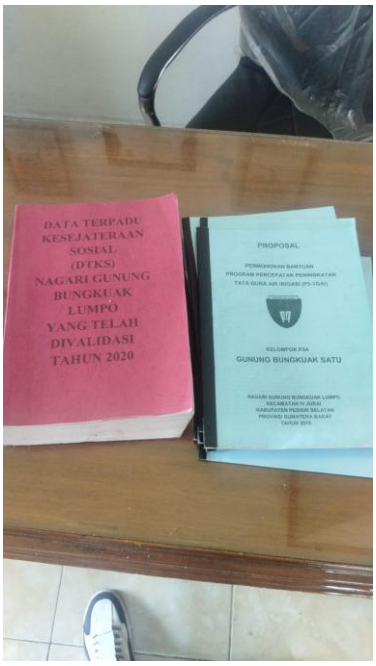
DATA TERPADU
KESEJATERAAN
SOSIAL
(DTKS)
NAGARI GUNUNG
BUNGKUAK
LUMPO
YANG TELAH
DIVALIDASI
TAHUN 2020
PROPOSAL
GUNUNG BUNGKUAK SATU

